



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN PESISIR BARAT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN LABUHANBATU
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
KOTA DUMAI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN TOBA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN MERANGIN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN PANIAI
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

SENIN, 13 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024
- Pemohon: Septi Heri Agusnaeni dan Ade Abdul Rochim

PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024
- Pemohon: Hendri Syahputra Daulay dan Ellya Rosa Siregar

PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Dumai Tahun 2024
- Pemohon: Ferdiansyah dan Soeparto

PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024
- Pemohon: Poltak Sitorus dan Anugerah Puriam Naiborhu

PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024
- Pemohon: Nalim dan Nilwan Yahya

PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024
- Pemohon: Robby Kayame dan Hengki Kudiai

PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024
- Pemohon: Thomas Yeimo dan Yeri Adii

PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024
- Pemohon: Nason Uti dan Jhon Deki Yogi

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Senin, 13 Januari 2025, Pukul 12.56– 15.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Bisariyadi
2. Oly Viana Agustine

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 38/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Ridwan Syaidi Tarigan
2. Zahyan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Akhyar Idris Sagala
2. Jalaluddin

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Eko Saputra
2. Noor Aufa

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 94/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Marudut Hutajulu
2. Hobbin Gultom

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 180/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Yuskandar
2. Dimas Amanda Wahid

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 291/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ishak Samuel Ronsumbre
2. Irwan P. Pangaribuan

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 296/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Periaty Ginting
2. Sergius Wabiser

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 298/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Akhamad Leksono
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu

I. Termohon:

1. Miftah Farid
2. Wahyuningsih

3. Zulfan
4. Riduan Marpaung
5. Alber Trisman

6. Sem Nawipa
7. Sisilia Nawipa
8. Petrus Nawipa

J. Kuasa Hukum Termohon:

1. Fikri Surya
2. Ricki Ramadhan
3. Dina Luthfika
4. Henry Simon Sitingjak

5. Saleh
6. Habib Amanatullah Rahdar
7. M. Fadi Abd Rachman
8. Afif Rosadiansyah

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 38/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Hermansyah D.
2. Zefun Erizal

L. Pihak Terkait Perkara Nomor 59/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ahmad Rifai Hasibuan

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 59/PHPU.BUP-XXIII/2025

1. Ahmad Ansyari Siregar

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Muhammad Arrasyid Ridho
2. Zulchairi Pahlawan

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 94/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Parulian Siregar
2. Rikardo Hutapea

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 180/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Heru Widodo
2. Muhamad Halik Alnemer

Q. Pihak Terkait Perkara Nomor 291, 296, 298/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Yampit Nawipa

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 291, 298/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ace Kurnia

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 296/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ridwan Darmawan

T. Bawaslu:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Totok Hariyono | 7. Man Fret Dogopia |
| 2. Abd Kodrat | 8. Yuli Mince Manawiwa |
| 3. Arman Harapan | 9. Himun Zuhri |
| 4. Bernat Panjaitan | 10. Nuris Bailan Noverminda |
| 5. Yossi Rinaldi | 11. Joko Arief Budiyono |
| 6. Yeni Kartini | |

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.56 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara 38, 89, 291, 296, 298, 59, 94, 180, PHPU Bupati dan Wali Kota Tahun 2025 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Hari ini kita akan ... apa ... melanjutkan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon, pokok-pokok permohonan. Tadi saya ... kami sudah cek bahwa semua Pihak, Pemohon, Termohon, Pihak terkait, dan Bawaslu sudah hadir. Jadi, tidak perlu diabsen lagi atau dipanggil satu-satu.

Nanti juga akan muncul satu-satu. Nah, dalam ... apa ... dalam penyampaian pokok permohonan, beberapa hal yang harus kami sampaikan. Pertama, yang disampaikan adalah pokok-pokoknya saja. Paling lama masing-masing permohonan 15 menit.

Yang kedua. Apa yang ditulis dalam Permohonan yang diregistrasi, apakah itu permohonan awal atau permohonan perbaikan, tidak boleh lagi diperbaiki. Jadi, enggak ada lagi perbaikan, apa pun jenisnya.

Dan yang ketiga. Yang disampaikan adalah apa yang tertulis dalam permohonan. Itu saja.

Dan kita mulai sekarang dengan mendengar Pemohon 38 menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Dipersilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [02:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [02:01]

38 hadir, ya, silakan.

4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERMANSYAH DULAIMI [02:04]

Yang Mulia, mohon izin dari Pihak Terkait 38.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:09]

Ada apa, Pak?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERMANSYAH DULAIMI [02:11]

Saya adalah Kuasa Tambahan dari Pihak Terkait Perkara Nomor 38, Kabupaten Pesisir Barat.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:15]

Ya.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERMANSYAH DULAIMI [02:19]

Dan kami sudah siapkan untuk mendaftarkan Surat Kuasa, hanya kata Petugas, "Untuk diserahkan pada hari ini."

9. KETUA: SALDI ISRA [02:23]

Nanti, Pak, ya, dipegang dulu, ya. Selesai mereka menyampaikan, baru kita giliran ditanya.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERMANSYAH DULAIMI [02:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:29]

Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [02:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Nomor 1311 Tahun 2024.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:43]

Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [02:44]

Untuk Kewenangan Mama ... Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan.

Dan untuk Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan dianggap dibacakan karena kami tidak melewati waktu.

Untuk kedudukan hukum Pemohon. Bahwa harus diakui oleh Pemohon bahwasanya kami tidak memiliki kesesuaian dalam perolehan suara, tetapi kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menunda dan memeriksa pokok perkara dikarenakan ada terjadinya perselisihan antarmata pilih dengan jumlah surat suara, ada juga tentang tidak dijalankannya rekomendasi Bawaslu oleh KPU, ada juga tentang money politics sehingga kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menindaklanjuti dalam Pokok Permohonan.

Untuk Pokok Permohonan, untuk 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

V. Perselisihan antarmata pilih dengan jumlah surat suara. Bahwa di beberapa kecamatan, Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Bangkunt terjadi ... terjadi perbedaan kertas suara antara pemilihan bupati dan gubernur sehingga itu menjadi pertanyaan bagi Pemohon dan pada saat dipertanyakan oleh Pemohon, pihak dari Termohon tidak menggubris dan tidak menindaklanjutinya.

15. KETUA: SALDI ISRA [04:29]

Oke, lanjut.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [04:31]

Lalu, Termohon tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu.

17. KETUA: SALDI ISRA [04:35]

Berapa rekomendasi Bawaslu yang tidak dijalankan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [04:38]

Sepengetahuan di Permohonan kami satu, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [04:40]

Satu, ya? Itu rekomendasi berkenaan dengan apa?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [04:43]

Untuk PSU, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:45]

PSU di semuanya atau di tempat tertentu?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [04:48]

Di tempat tertentu.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:50]

Oke.

Bawaslu ada? Berapa rekomendasinya?

24. BAWASLU: ABD KODRAT [04:55]

1 TPS.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:57]

1 TPS itu sudah dilaksanakan, belum?

26. BAWASLU: ABD KODRAT [04:59]

Sudah, tapi dijawab oleh Termohon, Majelis.

27. KETUA: SALDI ISRA [05:03]

Oke, dijawab. Apa jawabnya?

28. BAWASLU: ABD KODRAT [05:07]

Bahwa ada regulasi yang berbeda antara pengaturan dari Bawaslu dan KPU sehingga KPU mengikuti perintah dari atasan mereka.

29. KETUA: SALDI ISRA [05:17]

Oke. Tapi 1 TPS, ya?

30. BAWASLU: ABD KODRAT [05:19]

1 TPS.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:20]

Dan tidak dilakukan PSU di situ?

32. BAWASLU: ABD KODRAT [05:21]

Tidak.

33. KETUA: SALDI ISRA [05:22]

Oke. Lanjut.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [05:26]

Baik. Untuk 9.

9. Tentang terjadinya money politic secara masif, yaitu dilakukan oleh Tim Paslon Nomor 01 yang disebar di TPS 01, TPS 02, TPS 03 yang menargetkan pengaruh perolehan suara terhadap Pemohon bahwa peristiwa tersebut telah dilaporkan secara lisan ke pengawas TPS, tetapi tidak ditindaklanjuti.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:47]

Ini pada hari pemungutan suara?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [05:49]

Ya, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [05:50]

Oke, terus?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [05:53]

Dan itu juga terjadi di beberapa kecamatan di TPS 01 Pekon Kuta Karang, terus juga ... ada juga di TPS 1, 2, 3, dan 4 di Pekon Negeri

Ratu, Kecamatan Ngambur, ada juga di Pekon Cahaya Kuningan yang dilakukan Tim Paslon Nomor 01 yang disebar di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04.

Lalu, ada juga di Pekon Penggawa Lima Ulu yang dilakukan Tim Paslon Nomor 01 yang disebar di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3. Lalu, ada juga di Pekon Suka Negeri, Kecamatan Bangkumat yang dilakukan Tim Paslon Nomor Urut 1 yang disebar di TPS 1, TPS 2. Lalu ada juga di Pekon Penyanding, Kecamatan Bangkumat yang dilakukan Tim Paslon Nomor 01 yang disebar di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [06:51]

Ini ada buktinya semua?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [06:53]

Ini ada buktinya semua, Yang Mulia (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [06:53]

Bukti berapa ini?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [06:56]

Kami baru mengajukan alat bukti tadi, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [06:59]

Tadi, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [07:00]

Ya, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [07:00]

Oke, lanjut.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [07:02]

Lalu juga ada di Pekon Tanjung Rejo, Kecamatan Bengkunt, itu disebar di TPS 1, TPS 2. Lalu juga ada di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt, itu ada di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5. Lalu, ada juga di Pekon Pagar Bukit, Kecamatan Bengkunt di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6. Lalu, ada juga di Pekon Suka Jadi, Kecamatan Krui Selatan yang dilakukan oleh tim paslon, yaitu disebar di TPS 1, TPS 2. Lalu, ada juga di Pekon Suka Banjar, Kecamatan Ngambur yang dilakukan pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4. Lalu ada juga di Pekon Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor 1 yang disebar di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5. Lalu juga ada di Pekon Rata Agung, Kecamatan Lemong yang dilakukan oleh Tim Paslon 01, yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3.

47. KETUA: SALDI ISRA [08:15]

Oke.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [08:15]

Bahwa peristiwa money politic tersebut mencederai pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung sehingga sangat layak Paslon 01 didiskualifikasi.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutus perkara ini.

Dengan Petitum.

49. KETUA: SALDI ISRA [08:35]

Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAHYAN [08:37]

Ya. Izin, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [08:38]

Ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAHYAN [08:38]

Menyampaikan Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1311 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Tahun 2024. Pada hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024, Pukul 02.00 WIB.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Dedi Irawan dan Irawan Topani dengan Nomor Urut 1.
4. Menetapkan Pasangan Calon Septi Heri Agusnaeni dan Ade Abdul Rochim memperoleh suara terbanyak pemilu ... Pemilukada 2024 di Kabupaten Pesisir Barat.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Kontitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami Pemohon Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [09:52]

Terima kasih.

Ada yang mau disampaikan, Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup.
Yang Mulia Pak Arsul? Cukup, ya.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: FIKRI SURYA [10:05]

Izin, Yang Mulia. Dari Termohon dari Perkara 38.

55. KETUA: SALDI ISRA [10:11]

Ada masalah apa?

56. KUASA HUKUM TERMOHON: FIKRI SURYA [10:12]

Izin, Yang Mulia. Terhadap Permohonan Pemohon tadi kami dari Kuasa Hukum Termohon terhadap Perkara 38, izin ingin mengajukan inzage sekaligus me (...)

57. KETUA: SALDI ISRA [10:21]

Anda ini tahu aturan enggak? Nanti.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: FIKRI SURYA [10:23]

Siap. Izin, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [10:24]

Sekarang giliran mereka dulu.

60. KUASA HUKUM TERMOHON: FIKRI SURYA [10:25]

Siap, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [10:26]

Ya.

62. KUASA HUKUM TERMOHON: FIKRI SURYA [10:26]

Siap.

63. KETUA: SALDI ISRA [10:32]

Terima kasih, jadi semua yang mau permintaan segala macam itu tunggu ini selesai dulu, ya. Nanti baru kita ini kasih hak prerogatifnya Pemohon sekarang.

Selanjutnya, 89, Kota Dumai.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [10:53]

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

65. KETUA: SALDI ISRA [10:56]

Walaikumssalam wr. wb.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [10:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon Kuasa Hukum. Dengan ini terhadap perihal perbaikan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 449 Tahun 2024, Tanggal 4 Desember Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai Tahun 2024. Pemohon/Kuasa dianggap dibacakan, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [11:28]

Ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [11:31]

Selanjutnya, terhadap Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum, legal standing, kami anggap bacakan.

69. KETUA: SALDI ISRA [11:42]

Ya.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [11:43]

Seterusnya (...)

71. KETUA: SALDI ISRA [11:44]

Itu soal apa ... gimana tenggang apa ... tenggang waktu terpenuhi, ya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [11:47]

Masih terpenuhi, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [11:49]

Kalau soal 158-nya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [11:51]

Kita kesampingkan, Yang Mulia. Terhadap adanya TSM, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [11:54]

Ya, apa TSM-nya. Silakan.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [11:55]

Baik, Yang Mulia.

Dalam pokok permohonan pada Poin 5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif baik oleh Termohon serta pasangan calon dengan Nomor Urut 3 yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan dengan berbagai cara dengan uraian-uraian, sebagai berikut.

1. Bahwa sebelum dilaksanakan proses kampanye dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh Termohon, ternyata didapati calon wali kota yaitu Pihak Terkait dari Pasangan Calon Urut Nomor 3 yang juga sebagai wali kota yang menjabat Di Kota Dumai (...)

77. KETUA: SALDI ISRA [12:39]

Ini incumbent, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [12:41]

Benar, Yang Mulia.
Incumbent, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [12:43]

Terus?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [12:44]

Telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana Calon Wali Kota Pasangan Nomor Urut 3 telah menggunakan kewenangan dan jabatan yang melekat padanya sebagai Wali Kota Kota Dumai dalam melakukan suatu perjanjian atau kontrak politik dalam bentuk Nota Kesepahaman bersama dengan salah satu komunitas masyarakat yang berada di kota Dumai yaitu, Ikatan Keluarga Masyarakat Batak Kota Dumai, IKMBD, dengan memberikan janji-janji serta permintaan agar dipilihnya kembali petahana dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2024 yang berkaitan dengan proses penganggaran dari anggaran pendapatan belanja daerah Kota Dumai.

81. KETUA: SALDI ISRA [13:21]

Ini kapan kejadiannya ini?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [13:23]

Ini sebelum pilkada, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [13:28]

Iya sebelum pilkada itu kan Panjang (...)

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [13:29]

2 bulan, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [13:30]

Kapan? Bisa gak disebutkan spesifiknya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [13:33]

Di bulan Juli kalo engga salah. Ada di lampiran, ada bukti kita, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [13:37]

Oke.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [13:39]

Selanjutnya, Yang Mulia. Pada poin 2.

Bahwa sebelum dilaksanakan proses kampanye dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh Termohon didapati pula Calon Wali Kota Pasangan Nomor Urut 3 memberikan bingkisan berisi beberapa barang, yaitu kain sarung dengan logo 2 periode yang bertuliskan nama Pihak Terkait dan di dalam bingkisan tersebut pula diselipkan amplop berisi uang Rp100.000,00 dan diberikan secara diam-diam kepada masyarakat.

89. KETUA: SALDI ISRA [14:08]

Berapa banyak masyarakat yang menerima?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [14:11]

Hampir di 7 kecamatan itu, Yang Mulia.
Makanya, suara dari pemilihan kemarin, Yang Mulia, izin signifikan 70% rata-rata, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [14:20]

Ya, semua masyarakat menerimanya?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [14:23]

Yang kami dapati, ya, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [14:25]

Anda bisa buktikan sebenarnya itu?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [14:26]

Insha Allah, kami buktikan nanti (...)

95. KETUA: SALDI ISRA [14:27]

Oke, lanjut.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [14:28]

Jika masuk masa pembuktian, Yang Mulia

97. KETUA: SALDI ISRA [14:30]

Jangan dulu ini kan sekarang, Anda buktikan dulu ini.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [14:32]

Baik, Yang Mulia.

- 99. KETUA: SALDI ISRA [14:33]**
- Terus?
- 100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [14:33]**
- Terima kasih.
Selanjutnya, bahwa ada upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dan hal tersebut terlihat suatu pelanggaran-pelanggaran baik sebelum pencoblosan maupun setelah pencoblosan. Di antaranya Termohon dengan sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih. Termohon dengan sengaja (...)
- 101. KETUA: SALDI ISRA [14:58]**
- Kenapa banyak undangan yang tidak disampaikan?
- 102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [14:59]**
- Ada di 2 kecamatan, Yang Mulia.
Lebih Kurang 400 sekian, Yang Mulia.
- 103. KETUA: SALDI ISRA [15:08]**
- 400 sekian?
- 104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [15:09]**
- Ya.
- 105. KETUA: SALDI ISRA [15:11]**
- Oke, nanti kita cek.
- 106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [15:12]**
- Baik, Yang Mulia.
- 107. KETUA: SALDI ISRA [15:13]**

Oke.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [15:15]

Termohon dengan sengaja tidak secara benar menyosialisasikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif melalui ajakan untuk memilih dimana hal ini terlihat dari begitu banyak yang masyarakat Kota Dumai dalam DPT tidak menggunakan hak pilihnya saat dilaksanakan Pemilukada Kota Dumai.

Selanjutnya, Termohon sengaja tidak secara benar menyosialisasikan pemilih tidak dapat memilih dengan menunjukkan KTP. Pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon beserta jajaran petugas pelaksana pilkada yang menguntungkan salah satu calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Selanjutnya. Bahwa Termohonan yang ... yang bertindak tidak netral telah menempatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan pasang, petahana.

Selanjutnya bahwa Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilihan yang dikirimkan oleh petugas pemutakhiran data, diperoleh dari setiap RT di Kota Dumai ke dalam DPT. Akibatnya ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk memiliki hak pilih, namun tidak tercatat dalam DPD ... dan akhirnya DPT ... dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

109. KETUA: SALDI ISRA [16:23]

Oke. Lanjut.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [16:24]

Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan pemuta ... pemutakhiran data a quo adalah merupakan kesengajaan untuk menghilangkan (...)

111. KETUA: SALDI ISRA [16:30]

Oke, ini semuanya menyangkut kehilangan hak pilih (...)

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [16:33]

Kehilangan hak pilih.

113. KETUA: SALDI ISRA [16:33]

Ada lagi yang lain?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [16:34]

Baik, selanjutnya, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA [16:35]

Ya.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [16:36]

Bahwa dalam pemilihan lokasi TPS, kita temukan bagi para pemilih ternyata penyelenggara Pemilukada Kota Dumai dengan sengaja memindahkan lokasi TPS. Bagi para pemilih yang berjarak jauh dengan tempat tinggal pemilih dimana sebelumnya pada pemilihan umum nasional dan pemilihan presiden TPS para pemilih berada di sekitar rumahnya.

117. KETUA: SALDI ISRA [16:55]

Oke, itu masih menyangkut hak pilih. Yang lain?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [16:57]

Hak pilih.

Baik, Yang Mulia, kita anggap dibacakan terhadap hak pilih.

119. KETUA: SALDI ISRA [17:03]

Yang lain, pelanggaran lain apa lagi?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [17:05]

Pelanggaran terlain adalah ... baik, selanjutnya, Yang Mulia. Pada angka 4. Bahwa sebelum dilaksanakannya yang proses kampanye dan

pemilihan kepala daerah secara langsung, ternyata Pasangan Calon Wali Kota Nomor Urut 3 telah melakukan mobilisasi dan pengarahan kepada ketua rukun tetangga, RT, dan lembaga pemberdayaan masyarakat (...)

121. KETUA: SALDI ISRA [17:34]

Itu poin berapa itu? Halaman berapa?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [17:37]

Itu halaman 15, Yang Mulia (...)

123. KETUA: SALDI ISRA [17:38]

Oke.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [17:39]

Pada poin angka 4.

125. KETUA: SALDI ISRA [17:40]

Sabar, kita cek.

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [17:42]

Baik.

127. KETUA: SALDI ISRA [17:45]

Oke, sebelum pelaksanaan proses kampanye, ya? Ini kapan ini, sebelumnya?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [17:48]

Ini juga 21 (...)

129. KETUA: SALDI ISRA [17:50]

21 Agustus?

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [17:52]

Tanggal 21 Agustus.

131. KETUA: SALDI ISRA [17:53]

Belum ada calon, kan?

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [17:56]

Sudah, kemarin pendaftaran tanggal 3.

133. KETUA: SALDI ISRA [17:59]

Bukan, calon itu kapan adanya?

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [18:01]

Oh, belum ditetapkan, Yang Mulia.

135. KETUA: SALDI ISRA [18:03]

Ya. Jadi (...)

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [18:03]

Baik, Yang Mulia.

137. KETUA: SALDI ISRA [18:03]

Ini lawyer-lawyer yang berkecimpung pemilu, tuh, harus tahu juga.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [18:07]

Baik, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [18:08]

Ya, kapan ... kapan orang dianggap calon, bakal calon, ditetapkan sebagai calon, ya? Oke, lanjut. Ini outbound ke Bukit Tinggi ngapain ini? Coba ceritakan.

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [18:19]

Tanggal 21 Agustus tahun 2024, Yang Mulia.

141. KETUA: SALDI ISRA [18:20]

Ya, bagaimana?

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [18:22]

Di Bukit Tinggi, Yang Mulia.

143. KETUA: SALDI ISRA [18:25]

Ya, bagaimana di Bukit Tinggi-nya?

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [18:28]

Jadi, ceritanya, Yang Mulia.

145. KETUA: SALDI ISRA [18:28]

Ya.

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [18:29]

Bahwa petahana saat itu, membawa seluruh RT yang ada di Kota Dumai, di seluruh Kecamatan Dalura LPMK untuk pergi dengan alasan outbound di sana, Yang Mulia.

147. KETUA: SALDI ISRA [18:41]

Berapa RT seluruh Kota Dumai ini? Jumlahnya?

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [18:45]

Kalau untuk RT, di 37 ... 36 kelurahan, hampir menyeluruh semua, Yang Mulia.

149. KETUA: SALDI ISRA [18:53]

Nah, itu. Jadi, kalau kita menyebut sesuatu tuh, mesti kalau ditanya Hakim, ketika Anda mengatakan semua RT, berapa itu harus tahu angkanya.

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [19:00]

Baik, Yang Mulia.

151. KETUA: SALDI ISRA [19:03]

Karena ini ber ... berkorelasi dengan suara loh.

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [19:05]

Baik, siap.

153. KETUA: SALDI ISRA [19:07]

Ya. Nah, itu jangan main umum saja, semuanya di sekian kecamatan. Nah, itu ndak exact namanya barangnya.

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [19:14]

Baik.

155. KETUA: SALDI ISRA [19:16]

Ya, silakan. Apa lagi?

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [19:18]

Selanjutnya, pada poin 5. Bahwa sebelum dilaksanakan proses kampanye dan pemilihan kepala daerah secara langsung, ternyata pasangan dengan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan kegiatan bagi seluruh kader posyandu juga, Yang Mulia. Se-Kota Dumai pada tanggal 4 sampai dengan 6 September tahun 2024 di Harau, Kabupaten Lima

Puluh Kota Sumatera Barat, dan pada saat kegiatan ini terjadi proses pengarahan dan penekanan untuk memilih kembali petahana selaku dalam Pemilukada Kota Dumai Tahun 2024, Yang Mulia.

157. KETUA: SALDI ISRA [19:49]

Oke.

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [19:50]

Itu Bukti P-6.

159. KETUA: SALDI ISRA [19:51]

Lanjut.

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [19:52]

Selanjutnya bahwa dalam pelaksanaan kampanye Pemilukada Kota Dumai tahun 2024, banyak melibatkan ASN dan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan atau LPMK dimana hal sedemikian rupa yang sangat jelas dan terang benderang, penyelenggara dan Bawaslu terkesan membiarkan sebab tidak mengambil tindakan apa pun sehingga hal demikian telah secara jelas melanggar beberapa ketentuan dan perundang-undangan mengatur terhadap ... Bukti P-7.

161. KETUA: SALDI ISRA [20:17]

Oke, lanjut.

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [20:18]

Bahwa bagian kesejahteraan rakyat atau kesra, di sini ada keterlibatan dari UPD atau Instansi Pemerintah Kota Dumai. Sebagai bagian dari unsur pemerintahan di Kota Dumai telah melaksanakan bimbingan teknis atau Bimtek Dana Hibah pada tanggal 4 November tahun 2024 dimana dalam nametag para peserta Bimtek, serta baliho yang ada di sekitar lokasi bimtek memperlihatkan foto Calon Wali Kota Nomor Urut 3 yang merupakan petahana dalam Pemilukada (Bukti P-8), Yang Mulia.

163. KETUA: SALDI ISRA [20:49]

Oke, kalau ini, sudah suasana kampanye, ya?

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [20:52]

Baik, Yang Mulia.

165. KETUA: SALDI ISRA [20:53]

Jadi bagaimana itu cara meletakkan? Di dalam ruangan itu disebar foto Nomor Urut 3?

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [20:56]

Jadi, saat dia lakukan bimtek tersebut, Yang Mulia.

167. KETUA: SALDI ISRA [20:58]

Ya.

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [20:59]

Diletakkanlah flyer, tapi dia sebagai Wali Kota Dumai saat itu, Yang Mulia.

169. KETUA: SALDI ISRA [21:04]

Oke, jadi bukan sebagai calon, ya?

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [21:06]

Bukan, Mulia.

171. KETUA: SALDI ISRA [21:07]

Oke.

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [21:09]

8.

173. KETUA: SALDI ISRA [21:10]

Ya.

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [21:11]

Bahwa selama tahapan Pemilukada dan sudah ditetapkannya Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Dumai Tahun 2024, ternyata dari Pemerintahan Kota Dumai melaksanakan kegiatan pemberian bansos di Kecamatan Sungai Sembilan pada tanggal 4 Oktober Tahun 2024 dimana pada saat pemberian bantuan sosial ini disertai dengan kartu yang menyertakan adanya foto Calon Wali Kota dari Pasangan Nomor Urut 3.

175. KETUA: SALDI ISRA [21:33]

Ini pasangan calon atau wali kota yang lama itu yang ditaruh gambarnya?

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [21:37]

Wali kota yang lama, Yang Mulia.

177. KETUA: SALDI ISRA [21:38]

Wakilnya enggak ada?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [21:39]

Wakilnya enggak ada.

179. KETUA: SALDI ISRA [21:40]

Oke, lanjut.

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [21:41]

Bahwa setelah peristiwa kebakaran di Pasar Pulau Payung, Kota Dumai kemudian pada tanggal 11 Oktober tahun 2024, Pasangan Calon Wali Kota Nomor Urut 3 beserta tim mengunjungi lokasi kebakaran Pasar

Pulau Payung dan kemudian memberikan bantuan atau sagu hati berupa uang kepada warga di sekitar lokasi kebakaran Pasar Pulau Payung (Bukti P-10) dan itu juga kita sudah laporkan, tetapi tidak ditindaklanjuti, Yang Mulia, di Bawaslu.

181. KETUA: SALDI ISRA [22:08]

Jadi ini, Pak Haji Paisal ini datang ke tempat kebakaran, ngasih uang sagu hati begitu?

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [22:13]

Ya, Yang Mulia, kepada korban kebakaran itu, Yang Mulia.

183. KETUA: SALDI ISRA [22:14]

Oke.

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [22:16]

Saat itu sudah masa kampanye, Yang Mulia.

185. KETUA: SALDI ISRA [22:18]

Oke, yang dibawa uang pemda atau uang dia?

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [22:20]

Pokoknya terlihat di bukti itu uang dari (...)

187. KETUA: SALDI ISRA [22:23]

Pokoknya yang penting bawa uang lah gitu, ya. Oke, lanjut. 10.

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [22:27]

10. Bahwa dalam pemilihan lokasi tempat pemungutan suara, itu dianggap tadi sudah dibacakan (...)

189. KETUA: SALDI ISRA [22:32]

Ya.

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [22:33]

Pada poin sebelas. Bahwa telah dilaksanakan kegiatan dengan alasan jemput aspirasi atau audiensi terkait semua persoalan yang dihadapi masyarakat di setiap kelurahan oleh Pasangan Calon Wali Kota dengan Nomor Urut 3.

Kemudian setelah acara, setiap warga yang hadir dengan mobilisasi diberikan uang tunai sebesar Rp100.000,00 per orang serta diminta menandatangani pada suatu meja pendaftaran saat itu, Yang Mulia, setelah audiensi.

191. KETUA: SALDI ISRA [23:00]

Berapa orang yang hadir di situ?

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [23:01]

Merata, Yang Mulia, di kelurahan.

193. KETUA: SALDI ISRA [23:03]

Merata ini gimana maksudnya ini?

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [23:04]

Itu lebih-kurang ada 130-an warga yang hadir di daftar meja hadir para (...)

195. KETUA: SALDI ISRA [23:06]

Ada buktinya ini?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [23:07]

Ada, Yang Mulia.

197. KETUA: SALDI ISRA [23:08]

Oke.

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [23:09]

Dan video juga yang kita lampirkan.

199. KETUA: SALDI ISRA [23:10]

Oke lanjut.

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [23:12]

12. Bahwa sebelum melaksanakan kampanye, telah dilakukan intimidasi dan persekusi oleh Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 kepada Posko Relawan Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2 yang berlokasi di Jalan Cempedak, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai pada hari Kamis, tanggal 21 November tahun 2024 sekitar Pukul 4 sore dengan jalan memasuki posko pemenangan relawan Pemohon dan melakukan tindak kekerasan, serta persekusi terhadap relawan Pemohon, serta menuding relawan Pemohon adalah penyebar fitnah, serta melakukan black campaign kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

201. KETUA: SALDI ISRA [23:54]

Oke.

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [23:55]

Bahwa ... selanjutnya. Bahwa setelah proses jadwal kampanye yang dilaksanakan oleh Termohon selesai, dalam masa tenang, menjelang dilaksanakan pencoblosan suara di masing-masing TPS yang telah ditentukan di Kota Dumai, Calon Wali Kota dari Pasangan Nomor Urut 3 langsung bergerak secara aktif dalam posisi dan jabatan, serta kewenangan selaku Wali Kota Dumai dengan mengadakan berbagai kegiatan-kegiatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, serta kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa ... masyarakat ... warga masyarakat pemilih yang tentunya hal ini berpengaruh secara signifikan dalam perolehan suara pasangan calon dalam melaksanakan Pemilukada Kota Dumai.

203. KETUA: SALDI ISRA [25:33]

Ada buktinya, ini?

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [24:34]

Ada, Yang Mulia.

205. KETUA: SALDI ISRA [25:35]

Bukti berapa?

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [24:36]

Ini nanti kita lampirkan dalam alat bukti tambahan, Yang Mulia, izin.

207. KETUA: SALDI ISRA [25:39]

Oke. Jangan *kita, kami*.

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [24:40]

Kami, Yang Mulia. Ya, kami, Yang Mulia.

209. KETUA: SALDI ISRA [25:43]

Anda ini mau mengajak-ngajak Hakim untuk ikut bersengketa, bagaimana ini. Silakan.

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [24:50]

Baik, pada Poin 14.

Bahwa sesaat setelah dilakukan pemilihan di TPS 006 yang berlokasi di RT 09 Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai telah dilakukannya intimidasi oleh sekelompok orang yang mengaku Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 dimana akibat hampir sama perolehan nilai suara di Pasangan Nomor Urut 2, yaitu Pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 3, maka Ketua KPPS-nya diintimidasi dan diancam akan dibakar rumahnya karena di hampir semua TPS di Kota Dumai, Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh suara mayoritas.

211. KETUA: SALDI ISRA [25:23]

Oke. Kalau sudah mayoritas ngapain lagi mau membakar itu, kan?

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [25:27]

Jadi ... izin, Yang Mulia, kami jelaskan sedikit terkait hal ini karena memang di dalam RT ... TPS 06 itu, suaranya agak naik Pemohon, cuma selisih suara 19. Jadi, ada intimidasi, "Kok di sini enggak menang pada paslon yang ini." Begitu, Yang Mulia.

213. KETUA: SALDI ISRA [25:46]

Oke, lanjut. Nomor 16 enggak usah dibacakan, ya.

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [25:49]

Oke, Yang Mulia.
Nomor 17.

215. KETUA: SALDI ISRA [25:50]

Ya.

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [25:51]

Bahwa pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, penggelebugkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengurangi perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2, sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh wilayah Kota Dumai.

Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai masif, sistematis, dan struktur ... terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dan Calon dengan Nomor Urut 3, maka Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Dumai sesuai Keputusan 449 Tahun 2024.

217. KETUA: SALDI ISRA [26:34]

Oke, langsung ke Petitem.

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [26:35]

Langsung ke Petitem dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.

219. KETUA: SALDI ISRA [26:37]

Ya.

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: NOOR AUFA [26:38]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

221. KETUA: SALDI ISRA [26:38]

Ya.

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: NOOR AUFA [26:40]

Petitem.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Nomor 211/PL.02.6-BA/1472/2024 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tanggal 4 Desember 2024.
3. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 449 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai Tahun 2024.
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan H. Paisal, S.K.M., MARS dan Sugiyarto sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 3.
5. Menyatakan agar Komisi ... agar Komisi Pemilihan Kota Domo ... Kota Dumai melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota Dumai Tahun 2024 di seluruh kota Dumai dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan.
6. Memerintahkan Termohon mendiskuii ... mendisku ... kualifikasi dan mencabut hak Pasangan Nomor Urut 3 yaitu

H. Paisal, S.K.M., MARS dan Sugiyarto sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kota Dumai karena terbukti telah melakukan pelanggaran keten ... ketentuan pemilukada.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi beredapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

223. KETUA: SALDI ISRA [28:30]

Terima kasih, ada yang mau disampaikan, Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

224. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:35]

Terima kasih, Pak Ketua Panel.
Kuasa Pemohon?

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [28:43]

Baik, Yang Mulia.

226. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:43]

Berapa tingkat ... berapa persen tingkat partisipasinya?

227. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [28:53]

Tingkat partisipasi itu 50%, Yang Mulia.

228. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:54]

50%, pasti?

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [28:57]

Pasti, Yang Mulia.

230. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:00]

Betul, ya.

Oke nah, ini kan Anda mengatakan hilangnya hak pemilih karena tidak dimasukkannya nama pemilih dalam DPT kemudi ... padahal banyak masyarakat yang harusnya masuk dalam DPT karena sudah memenuhi syarat, tapi tidak dimasukkan, ini berapa jumlahnya? Kuantifikasinya?

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [29:21]

Secara spesifik yang kita dapat di lapangan itu, Yang Mulia, kalau dihitung itu hampir 20.000, Yang Mulia.

232. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:30]

20.000?

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [29:30]

Ya, di setiap TPS kelurahan dan kecamatan itu, Yang Mulia.

234. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:31]

Oke, bisa Anda buktikan itu, ya?

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [29:40]

Baik, Yang Mulia.

236. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:42]

Nanti, harus Anda buktikan itu oke. Terus, tadi waktu ... kan sudah waktu kampanye ada kegiatan.

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [29:51]

Ya, Yang Mulia.

238. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:53]

Mencantumkan.

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [29:53]

Bimtek?

240. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:57]

Wali Kota yang apa ... lama. Nah waktu itu kan ada pejabat wali kotanya.

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [30:00]

Belum ada, Yang Mulia.

242. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:02]

Siapa Pj-nya?

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [30:04]

Belum ada saat itu, Yang Mulia.

244. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:04]

Lho, kan selama masa kampanye kan cuti.

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [30:09]

Oh, ada pjs, ada, Yang Mulia.

246. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:09]

Ya, pjs.

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [30:09]

Ya.

248. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:13]

Siapa pjs-nya?

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [30:15]

Ada, Syahrul, Yang Mulia.

250. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:16]

Siapa dia?

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [30:18]

Apa Mulia?

252. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:18]

Apa ... apa dia dari apa? Pemkot sendiri atau dari provinsi?

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [30:25]

Eggak, Yang Mulia, penunjukan dari Kemendagri.

254. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:25]

Dari Kemendagri. Memang pjs-nya enggak tersinggung itu ada acara, dia sudah jadi pjs kan berarti dia wali kotanya lah, acting wali kota gitu, kok gambarnya kok gambar wali kota yang lagi bertarung.

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [30:42]

Saat itu enggak ada persoalan.

256. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:44]

Eggak ada ini (...)

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [30:45]

Eggak ada, Yang Mulia.

258. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:46]

Ada reaksi. Begitu, ya, Anda bisa buktikan itu nanti gambar-gambar itu?

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [30:51]

Baik, Yang Mulia. Bisa kita buktikan, Yang Mulia.

260. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:51]

Ya, oke. Karena Mahkamah ini memutusnya berdasarkan bukti, bukan berdasarkan statement, ya.

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [30:58]

Baik, Yang Mulia.

262. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:00]

Oke, terima kasih. Cukup Pak Ketua

263. KETUA: SALDI ISRA [31:03]

Terima kasih, Yang Mulia. Pak Ridwan, silakan.

264. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:07]

Makasih, Yang Mulia Ketua Panel.
Saudara Kuasa Pemohon.

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [31:12]

Ya, Yang Mulia.

266. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:13]

Ini di dalil Saudara di butir ke 5 ini kan TSM, ya.

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [31:18]

Ya, Yang Mulia.

268. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:19]

Ini banyak sekali Saudara uraikan, tetapi belum dirujuk buktinya itu, ya, supaya nanti lebih mudah harusnya dimasukkan dulu.

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [31:30]

Ya, ada tambahan daftar alat bukti yang akan kami ajukan nanti, Yang Mulia.

270. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:32]

Saudara, harus buktikan.

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [31:34]

Baik

272. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:36]

Apa yang Saudara dalilkan itu siapa yang mendalilkan yang membuktikan supaya nanti bisa direspons oleh pihak-pihak yang lain. Nah, di sini kan petitum Saudara itu membatalkan, ya? Kemudian juga minta di diskualifikasi itu yang Paslon 3, ya?

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [31:56]

Ya, Yang Mulia.

274. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:59]

Itu petahana, ya?

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [32:00]

Petahana, yang menang.

276. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [32:02]

Petahana, ya? Kemudian minta suara ulang di seluruh Kota Dumai?

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [32:05]

Ya, Yang Mulia.

278. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [32:07]

Ya. Itu aja sementara, Yang Mulia. Terima kasih.

279. KETUA: SALDI ISRA [32:14]

Cukup, terima kasih.

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [32:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

281. KETUA: SALDI ISRA [32:22]

Sekarang kita lanjut ke Perkara 291. Silakan! Poin-poinnya, maksimal 15 menit.

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [32:32]

Ya. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Kami dari Perkara 291, PHPU Kabupaten Paniai untuk Pemohon Paslon Nomor 2. Saya perkenalkan, saya Ishak Ronsumbre dan rekan saya Irwan dari LBH Rimba Papua.

Sebagai pendahuluan, Majelis, bahwa seperti kita ketahui, Paniai merupakan salah satu daerah dimana proses pemilihannya adalah pemilihan Sistem Noken seperti yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku dan seharusnya dalam pelaksanaannya itu terjadi proses pemilihan atau pemungutan suara di lapangan atau di TPS. Namun, yang terjadi pada tanggal 27 November adalah tidak ada sama sekali proses pemungutan suara di TPS atau di kampung sehingga ini yang menjadi persoalan kami yang membuat kami mengalami ... Pemohon mengalami perselisihan suara dengan salah satu Paslon Nomor Urut 1 yang mendapatkan suara cukup besar.

283. KETUA: SALDI ISRA [33:54]

Ya.

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [33:56]

Ya. Terkait dengan objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 Tanggal 14 Desember 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu, 15 Desember 2024, Pukul 22.15.

Untuk kewenangan Mahkamah, kami anggap dibacakan.

285. KETUA: SALDI ISRA [34:24]

Ya, berwenang?

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [34:26]

Terkait dengan tenggang waktu dari tanggal 14, kami mendaftarkan tanggal 17. Jadi, sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan. Lalu, untuk perbaikan di tanggal 19 Desember 2024.

287. KETUA: SALDI ISRA [34:43]

Ya.

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [34:44]

Kedudukan hukum Pemohon, legal standing, kami anggap dibacakan karena sesuai dengan penetapan dari KPU untuk paslon. Namun, yang saat ini ingin kami sampaikan. Pemohon berpandangan bahwa selisih yang terjadi antara Pemohon dan juga Pihak Terkait atau yang dalam hal ini memiliki jumlah suara terbanyak itu terjadi karena ada pelanggaran-pelanggaran yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum legalitas untuk mengajukan pemohon ... Pemohonan ini ke Mahkamah Konstitusi.

289. KETUA: SALDI ISRA [35:31]

Di Paniai ini berapa jumlah TPS-nya, Pak?

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [35:34]

Untuk jumlah TPS-nya ada 307 TPS, jumlah kampung 208 kampung.

291. KETUA: SALDI ISRA [35:45]

Bentar, pelan-pelan.
TPS=307, kampungnya berapa?

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [35:48]

208 kampung.

293. KETUA: SALDI ISRA [35:49]

208 Kampung.

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [35:50]

Jumlah distrik, 24 distrik.

295. KETUA: SALDI ISRA [35:51]

24 distrik.

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [35:51]

Dan total pemilih untuk DPT Kabupaten Paniai=115.424 DPT.

297. KETUA: SALDI ISRA [36:04]

Seri ... 115, ya?

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [36:06]

Siap, Majelis.

299. KETUA: SALDI ISRA [36:07]

4 ... 4 berapa tadi?

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [36:11]

424.

301. KETUA: SALDI ISRA [36:12]

Oke. 115.424, ya?

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [36:15]

Baik, Majelis.

303. KETUA: SALDI ISRA [36:15]

Oke, lanjut.

Betul itu? Mana KPU Paniai ini ada? Betul itu jumlahnya? Oke, terima kasih. Lanjut.

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [36:25]

Ya, terkait dengan ambang batas. Kami mengesampingkan Pasal 158 karena TSM, Majelis.

305. KETUA: SALDI ISRA [36:34]

Ya.

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [36:35]

Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, Pemohon mendapatkan suara sebanyak 10.761 suara. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak=44.921 suara.

307. KETUA: SALDI ISRA [36:58]

Berapa? 44?

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [37:00]

921 suara.

309. KETUA: SALDI ISRA [37:01]

921? Oke.

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [37:04]

Bahwa terkait dengan perselisihan perolehan suara sebagaimana dimaksud, diuraikan di atas, maka Pemohon menjelaskan perbedaan perolehan hasil lapangan dan Form D.Hasil yang sudah disampaikan dalam permohonan. Beberapa contoh sebagai berikut.

Distrik Aradide jumlah DPT=3.080. Di distrik berdasarkan sistem noken, Pemohon memperoleh=995 suara, sedangkan dalam D.Hasil perolehan suara Pemohon adalah 0 sehingga Pemohon kehilangan 995 suara yang diberikan kepada paslon lain. Dan dalam D.Hasil, saksi-saksi dari para paslon itu tidak menandatangani D.Hasil karena semua terjadi di saat pleno KPU Kabupaten, Majelis.

Distrik Bogobaida jumlah DPT adalah=153 ... 1.536, di distrik ini berdasarkan sistem noken, Pemohon memperoleh 381 suara, sedangkan dalam D.Hasil memperoleh suara Pemohon adalah 0. Sehingga Pemohon kehilangan =381 suara yang diberikan kepada paslon lain.

Distrik Ekadide jumlah DPT adalah 5.691, di distrik ini berdasarkan sistem noken, Pemohon memperoleh =1 ... 1.001 suara, sedangkan dalam D.Hasil, perolehan suara Pemohon adalah 0. Sehingga Pemohon kehilangan 1.000 ... ulangi ... =1.000 suara yang diberikan kepada paslon lain.

Distrik Youtadi jumlah DPT adalah 1.522, di distrik ini berdasarkan sistem noken, Pemohon memperoleh 399 suara, sedangkan dalam D.Hasil, perolehan suara Pemohon adalah=0. Sehingga Pemohon kehilangan 399 suara yang diberikan kepada paslon lain.

Distrik Aweida jumlah DPT adalah 1.629, di distrik ini berdasarkan sistem noken, Pemohon memperoleh 605 suara, sedangkan dalam D.Hasil, perolehan suara Pemohon adalah 0. Sehingga Pemohon kehilangan 605 suara yang diberikan kepada paslon lain.

Distrik Bibida jumlah DPT adalah 2.656, di distrik ini berdasarkan sistem noken, Pemohon memperoleh 532 suara, sedangkan dalam D.Hasil, perolehan suara Pemohon adalah 100 suara. Sehingga Pemohon kehilangan 432 suara yang diberikan kepada paslon lain.

Distrik Nakama jumlah DPT adalah 2.721, di distrik ini berdasarkan sistem noken, Pemohon memperoleh 2.721 suara,

sedangkan dalam D.Hasil, perolehan suara Pemohon adalah 620 suara. Sehingga Pemohon kehilangan 210 suara yang diberikan kepada paslon lain.

Distrik Paniai Timur Kampung Enarotali/Dupia, TPS 1 sampai 20, DPT adalah sebanyak=11.000 suara. Distrik ini berdasarkan sistem noken, Pemohon memperoleh 10.000 suara. Sedangkan dalam hasil, perolehan suara Pemohon adalah 0 dalam D.Hasil. Sehingga Pemohon kehilangan 10.000 suara yang diberikan kepada paslon lain.

Kampung Iyaitaka, Distrik Paniai Timur, jumlah DPT 469 di kampung ini berdasarkan sistem noken, Pemohon memperoleh 350 suara. Sedangkan dalam D.Hasil, perolehan suara Pemohon adalah 0. Sehingga Pemohon kehilangan 350 suara yang diberikan kepada paslon lain.

Kampung Kogekotu, Kota Distrik Paniai Timur, jumlah DPT 464. Di kampung ini berdasarkan sistem noken, Pemohon memperoleh 370 suara. Sedangkan dalam D.Hasil, perolehan suara Pemohon adalah 0. Sehingga Pemohon kehilangan 370 suara yang diberikan kepada paslon lain.

Distrik Siriwo, jumlah DPT 4.671. Distrik ini berdasarkan sistem noken, Pemohon memperoleh suara adalah 1.450 suara. Sedangkan dalam D.Hasil, perolehan suara Pemohon adalah 0. Sehingga Pemohon kehilangan 145 suara yang diberikan kepada paslon lain.

Distrik Teluk Deya, jumlah DPT 5.408 distrik ini berdasarkan sistem noken, Pemohon memperoleh 508 suara. Sedangkan dalam D.Hasil, suara Pemohon adalah 993 suara. Sehingga Pemohon kehilangan 441 suara yang diberikan kepada paslon lain.

Distrik Topiyai, jumlah DPT 3.631. Distrik ini berdasarkan sistem noken, Pemohon memperoleh 907 suara. Sedangkan dalam D.Hasil, perolehan suara Pemohon hasil adalah 0. Sehingga kehilangan 90 suara yang diberikan kepada paslon lain.

Distrik ini ... Wegebino, jumlah DPT adalah 4.111. Distrik ini berdasarkan sistem noken, Pemohon memperoleh 1.000 suara. Namun dalam D.Hasil, hanya 354 suara. Sehingga Pemohon kehilangan 646 suara yang diberikan kepada paslon lain.

Distrik Yagai, jumlah DPT adalah 4.620. Distrik ini berdasarkan sistem noken, Pemohon memperoleh suara 4.620. Sedangkan dalam D.Hasil, suara Pemohon adalah 4.326 suara. Sehingga Pemohon kehilangan 300 suara yang diberikan kepada paslon lain.

Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, baik tingkat PPS, PPD, pandis dan ... dengan tidak melaksanakan tahapan Pemilu Kepala Daerah dengan baik sehingga menyebabkan terjadinya selisih angka perhitungan antara Pemohon dan Paslon Nomor 1.

Bahwa pada tanggal 11 Desember, Bawaslu Kabupaten Paniai telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 2 ...

002/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 yang sifatnya segera rekomendasi pembat ... segera, yaitu Rekomendasi Pembatalan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya karena ditemukan banyak pelanggaran dilakukan oleh Termohon (vide Bukti P-5).

Bahwa Termohon dalam hal ini, KPU Kabupaten Paniai tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai dengan meneruskan rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan di lapangan.

Bahwa atas pelanggaran tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Paniai telah menerbitkan Rekomendasi Nomor 003/Rekom/94.03/BWSLI.PAN/14/XII/2024 kepada KPU Paniai untuk membatalkan rekapitulasi karena telah terjadi pelanggaran, namun rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh KPU Paniai.

Persoalan yang terjadi seperti begitu, sehingga kami masuk kepada Petitem.

311. KETUA: SALDI ISRA [43:51]

Oke.

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [43:51]

Dibacakan oleh rekan saya.

313. KETUA: SALDI ISRA [43:52]

Ini, ini tidak dijalankan, ya, rekomendasi Bawaslu?

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [43:55]

Siap, Majelis

315. KETUA: SALDI ISRA [43:56]

Oke, nanti kita tanya. Lanjut, Petitem.

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN P. PANGARIBUAN [43:58]

Izin, melanjutkan, Yang Mulia.

317. KETUA: SALDI ISRA [43:59]

Ya.

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN P. PANGARIBUAN [43:58]

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2024, Pukul 22.15 WIT.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 dalam keputusan KPU/KIP Kabupaten Paniai Nomor 48 ... 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon, sebagai berikut.
Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pemohon dengan perolehan suara 44.921.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang atau PSU di 24 distrik pada 230 TPS dari 164 kampung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

319. KETUA: SALDI ISRA [45:28]

Oke. Jadi, tidak semua TPS diminta, ya?

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [45:30]

Siap.

321. KETUA: SALDI ISRA [45:31]

Hanya 230 TPS dari 307 TPS. Betul, ya?

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [45:39]

Siap, sesuai rekom, Majelis.

323. KETUA: SALDI ISRA [45:41]

Oke, terima kasih.

Yang Mulia Pak Ridwan, ada yang mau didalami? Cukup. Yang Mulia Pak Arsul? Silakan.

324. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:51]

Baik. Ini kan tadi Anda mengatakan dari berapa? 307, Anda minta ada PSU di 230. Ini semua yang Anda katakan tadi tidak ada pemilihan. Pemilihan dengan sistem noken maksud saya, begitu?

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [46:13]

Ya, saya sedikit mengulas tentang rekom Bawaslu karena kita berangkat dari Rekom Bawaslu 003, Majelis.

326. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:21]

Ya, apa coba? Sebelum nanti (...)

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [46:23]

Siap, Majelis.

328. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:26]

Sedikit saja.

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [46:27]

Baik.

330. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:27]

Singkat saja.

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [46:32]

Ya. Dalam surat Rekom Bawaslu Kabupaten Paniai tanggal 14 Desember 2024 yang sifatnya segera, dengan isi surat demikian, Majelis.

1. Pada hari pemungutan dan perhitungan suara hari Rabu, tanggal 27 Desember ... November 2024, pukul 07.00 sampai pukul 13.00, masyarakat di 230 TPS yang terdapat pada 164 desa atau kampung dan 19 kecamatan atau distrik tidak melaksanakan pemungutan suara dengan sistem tingkat TPS atau kampung untuk pemilihan Gubernur Papua Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai.
2. Bahwa hari pemungutan dan perhitungan suara hari Rabu, 27 November 2024, Form C.Hasil dari 230 TPS dari 164 kampung dan D.Hasil dari 19 distrik dihilangkan oleh PPD dan Panwaslu Distrik Kabupaten Paniai.
3. Bahwa tanggal 27 November sampai 3 Desember 2024 tidak pernah melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat TPS pada 230 TPS yang terdapat pada 16 kampung, tidak pernah mendapatkan C.Hasil dari KPPS dan PPD, serta Panwaslu Distrik dan saksi (...)

332. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [47:47]

Oke, cukup.

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [47:48]

Saksi (...)

334. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [47:48]

Cukup.

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [47:49]

Demikan, Yang Majelis.

336. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [47:50]

Ya. Yang kedua ini kan kalau dilihat dari apa ... data kuantitatifnya dari yang ditetapkan Pemohon itu semula 10.761 menjadi 44.921. Ini ada apa ... penambahan berarti 34.160, ya, ini ada nanti bisa buktikan?

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [48:20]

Siap, Majelis, siap.

338. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:21]

Begitu karena ini sistem noken.

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [48:22]

Berdasarkan data lapangan dan surat-surat pernyataan dari kampung, desa.

340. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:26]

Oh, begitu?

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [48:27]

Siap, Majelis.

342. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:28]

Oke, ya. Demikian juga, sebaliknya ini yang ditetapkan sebagai pemenang, ya, dari 54.763 menjadi 16.131, ini berkurang 38.632. Ini juga sebaliknya akan Anda buktikan.

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [48:48]

Ya, kami masih mengacu kepada data lapangan yang kami peroleh.

344. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:52]

Ya. Enggak apa-apa, pokoknya Anda harus buktikan.

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [48:53]

Baik, Majelis.

346. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:54]

Kalau mau berhasil, kan begitu kira-kira.

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [48:55]

Siap.

348. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:56]

Ya. Oke, saya kira cukup. Karena ini angkanya sangat besar sekali.

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [49:00]

Baik, Majelis.

350. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:01]

Yang diminta Pemohon itu dinaikkan, dan yang pemenang itu turun gitu, ya. Meskipun ini sekali lagi dalam konteks sistem noken kan begitu. Oke, terima kasih.

351. KETUA: SALDI ISRA [49:14]

Terima kasih.

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [49:15]

Izin, Yang Mulia, sebentar. Pemohon, Yang Mulia, Izin sebentar. Pemohon untuk mengundurkan diri, posisinya kami dapat telepon ... apa ... kakak saya tertabrak kendaraan soalnya.

353. KETUA: SALDI ISRA [49:28]

Ya. Oke, mudah-mudahan baik-baik saja. Dan kalau bisa pindah yang di depan pindah ke belakang, akan bisa giliran yang lain di depan. Terima kasih, ya.

Nomor 291, Pemohon 291. Halo, Kuasa 291 cukup, ya?

354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISHAK SEMUEL RONSUMBRE [49:43]

Cukup, Majelis.

355. KETUA: SALDI ISRA [49:44]

Oke, silakan biar ganti yang lain.

Sekarang dipersilakan untuk Permohonan Nomor 296.

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [50:53]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember tahun 2024, pukul 22.15 WIT. Pemohon Thomas Yeimo, S.STP., M.Si., dan Yeri Adii Paslon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024.

Kewenangan Mahkamah mohon dianggap dibacakan.

357. KETUA: SALDI ISRA [51:35]

Ya.

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [51:36]

Tenggang Waktu Permohonan berdasarkan e-NUPP dan APPP kami memasukkan permohonan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan.

359. KETUA: SALDI ISRA [51:43]

Oke.

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [51:45]

Kedudukan Hukum Pemohon. Terkait Pasal 158, Yang Mulia, mohon disimpangi karena diduga terjadi pelanggaran-pelanggaran TSM sehingga suara Pemohon yang seharusnya berdasarkan klaim Pemohon=48.320 di versi Termohon=23.490. Selisih suara tersebut terjadi karena selain perselisihan perhitungan, diduga terjadi pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif berupa terjadinya pengurangan suara Pemohon di beberapa TPS kampung, distrik, dan suara tersebut ditambahkan dan menggembong ... menggelembungkan suara di paslon lain, khususnya Paslon 01.

Terjadinya manipulasi jumlah DPT dalam Pemilihan Umum.

Penyelenggara tidak netral dan berpihak kepada salah satu paslon dalam Penyelenggaraan dan Perhitungan Hasil Pemilukada Tahun 2024 di Kabupaten Paniai.

Adanya praktik suap di penyelenggara KPU Kabupaten Paniai dan telah pula ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. Pelaksanaan Pleno tidak sesuai dengan formilnya dimana pelanggaran-pelanggaran (...)

361. KETUA: SALDI ISRA [53:00]

Praktik suap tadi, apa bentuknya?

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [53:03]

Adanya money politics, dimana ada oknum yang ingin menyuap penyelenggara dan aparat keamanan, Yang Mulia.

363. KETUA: SALDI ISRA [53:14]

Ingin menyuap atau telah menyuap?

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [53:16]

Tertangkap tangan uang di penyelenggara, Yang Mulia.

365. KETUA: SALDI ISRA [53:19]

Berapa jumlah uangnya?

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [53:20]

Rp200.000.000,00.

367. KETUA: SALDI ISRA [53:22]

Rp200.000.000,00, ya? Itu di mana itu? Di Kabu ... KPU atau di mana?

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [53:27]

Izin, Yang Mulia.

369. KETUA: SALDI ISRA [53:29]

Itu kejadiannya di kantor KPU atau dimana?

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [53:31]

Terjadinya di kantor KPU, di tangan Sekretaris KPU, Yang Mulia. Kami lampirkan alat bukti.

371. KETUA: SALDI ISRA [53:37]

Oke, lanjut!

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [53:38]

Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan Bawaslu Kabupaten Paniai, namun tidak ditanggapi. Kemudian pelanggaran-pelanggaran tersebut pun menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Paniai dan mengeluarkan surat rekomendasi dua kali, namun tidak dilaksanakan.

373. KETUA: SALDI ISRA [53:59]

Tidak dilaksanakan oleh KPU, ya?

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [54:02]

Betul, Yang Mulia,

375. KETUA: SALDI ISRA [54:04]

Oke.

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [54:04]

Dan juga yurisprudensi terkait dengan Pasal 158 sehingga Pemohon memohon agar menyatakan Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan a quo.

377. KETUA: SALDI ISRA [54:16]

Ya, lanjut!

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [54:18]

Pokok permohonan.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut. Tabel 1 (...)

379. KETUA: SALDI ISRA [54:34]

Dianggap dibacakan.

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [54:35]

Dianggap dibacakan.

381. KETUA: SALDI ISRA [54:36]

Ya.

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [54:36]

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berarti peringkat ketiga dengan perolehan suara 23.490.

383. KETUA: SALDI ISRA [54:38]

Oke.

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [54:44]

2. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon berdasarkan sistem noken/ikat suara dari rakyat Kabupaten Paniai, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut.

Tabel 2. Nomor Urut 1 Yampit Nawipa dan Ham Yogi=19.335.

385. KETUA: SALDI ISRA [55:04]

Oke, dianggap dibacakan.

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [55:07]

35, dianggap dibacakan.

387. KETUA: SALDI ISRA [55:08]

Ya.

388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [55:09]

Bahwa berdasarkan 3. Bahwa berdasarkan suara ... bahwa perubahan suara Pemohon dari 48.320 dan berada pada nomor urut pertama terbanyak menjadi 23.490 dan berada pada urut 3 adalah disebabkan oleh karena Termohon sengaja mengurangi/merampok suara Pemohon dan menambah atau mengembungkan pada suara Paslon Nomor Urut 1 yang lainnya ... dan yang lainnya. Hal ini sangat kuat dan beralasan mengingat Termohon tidak netral dan berpihak kepada Paslon Nomor Urut 1 dan diduga untuk berkon ... pengondisian perampokan suara Pemohon untuk diberikan/digelembungkan pada suara Paslon Nomor Urut 1.

Termohon telah menerima suap, namun tertangkap tangan. Bukti terlampir.

389. KETUA: SALDI ISRA [56:16]

Oke.

390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [56:20]

Yang ... saya mohon untuk yang makin suap adalah ada upaya suap yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Paniai terhadap pihak keamanan.

391. KETUA: SALDI ISRA [56:28]

Oke, jadi yang menyuap ini KPU, ya?

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [56:28]

KPU.

393. KETUA: SALDI ISRA [56:28]

Kepada pihak keamanan.

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [56:36]

Kepada, Pihak Keamanan, ketua dan anggota melalui sekretaris.

395. KETUA: SALDI ISRA [56:40]

Oke.

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [56:42]

KPU.

397. KETUA: SALDI ISRA [56:43]

Oke, nanti biar dijelaskan KPU nanti.

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [56:44]

Ya.

399. KETUA: SALDI ISRA [56:45]

Lanjut.

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [56:46]

Bahwa proses 4 ... bahwa proses Pleno tingkat distrik Paniai Timur, dilakukan pada hari Rabu, tanggal 27 November pukul 18.25 WIT dengan DPT=37.564 suara di halaman depan kantor distrik setelah masyarakat dan kepala suku di tingkat kampung dan distrik bersepakat untuk memberi suara kepada 3 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, yaitu Pasangan Calon Nomor 1 sebanyak 5.000 suara, untuk Pasangan Nomor 3 peroleh sebanyak 5.000 suara, dan untuk Pasangan Nomor 4, Pemohon, sebanyak 27.564 suara.

5. Bahwa Paslon Nomor Urut 1 di hadapan kapolda pada saat pertemuan dengan Kapolda Papua, bahkan mengakui bahwa dia merebut/merampas suara dari Pemohon dan paslon lain dengan alasan merasa dia yang punya basis. Namun, mendapatkan keberatan dari masyarakat dan paslon lain.

6 (...)

401. KETUA: SALDI ISRA [57:56]

Oke.

402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [57:56]

Dianggap dibacakan.

403. KETUA: SALDI ISRA [57:56]

Ya, terus.

404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [57:59]

7. Bahwa adapun data sesuai fakta lapangan yang didapatkan Pemohon dari 24 distrik di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tercantum dalam tabel 3 di bawah ini dianggap dibacakan.

405. KETUA: SALDI ISRA [58:20]

Oke, lanjut.

406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [58:23]

Tenggang waktu pengajuan tadi (...)

407. KETUA: SALDI ISRA [58:25]

Sudah, Tenggang waktu sudah.

408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [58:20]

2. Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 ditetapkan dan diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember tahun 2024 pukul 22.15 WIT. Pleno KPU tersebut dalam keadaan berdiri di depan pintu Aula RRI Kabupaten Paniai.

3. Bahwa 3 hari kerja sejak hari Sabtu (...)

409. KETUA: SALDI ISRA [59:02]

Itu, kan sudah. Tenggang waktu sudah (...)

410. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [59:02]

Dengan, waktunya sudah dianggap dibacakan.

411. KETUA: SALDI ISRA [59:05]

Pak, tenggang waktunya sudah, Pak.

Bapak sudah sampai di halaman 8 balik lagi ke halaman awal, sekarang halaman 9, Pak.

412. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [59:10]

Ya. Halaman 9 nomor 8. Bahwa menurut Pemohon selisih perelahan suara tersebut selain disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Disamping itu karena adanya keberpihakan penyelenggara sehingga terjadi perampokan suara Pemohon dan ditambahkan/digelembungkan kepada paslon lain yang

terjadi di tingkat TPS, kampung, dan distrik di Kabupaten Paniai, yaitu antara lain sebagai berikut.

413. KETUA: SALDI ISRA [59:47]

Oke, A sampai M dianggap diucapkan. Terus 9, halaman 10 point 9.

414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [59:47]

Bahwa kuat diduga adanya manipulasi jumlah DPT dimana berdasarkan Berita Acara Nomor 190/PL.01.2-BA/9403/2024 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di tingkat Kabupaten Paniai Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 20 bulan 9, 2024 dengan total jumlah pemilih sebanyak 115.424. Sementara berdasarkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kabupaten Paniai dalam Pemilihan Umum sebelumnya, yang berselang beberapa bulan adalah dengan total jumlah pemilih sebanyak 117.756.

415. KETUA: SALDI ISRA [01:00:55]

Jadi lebih kecil jumlah yang Pilkada, ya?

416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [01:00:56]

Pilkada lebih kecil.

417. KETUA: SALDI ISRA [01:00:56]

Oke, Lanjut.

418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [01:00:58]

Bahwa oleh karena terjadi perampasan suara Pemohon di beberapa TPS kampung dan distrik yang kemudian digelembungkan ke suara Paslon Nomor 1 dan paslon lain sebagaimana uraian di atas, menyebabkan Pemohon kehilangan suara sebanyak 24.430 suara.

419. KETUA: SALDI ISRA [01:01:18]

Oke. Lanjut, apa lagi yang penting-penting lagi?

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [01:01:23]

Lanjut ... lanjut dia nomor 12.

421. KETUA: SALDI ISRA [01:01:24]

Ya.

422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [01:01:25]

Bahwa Penyelenggara, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai dan PPD, menjadi bagian dari Tim Pemenang Paslon Nomor 1, bahkan bergabung dalam grup WhatsApp Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1 dengan nama Grup, 'Yampit Nawipa For 01 Paniai, Wilayah Barat Deya Yawei'.

423. KETUA: SALDI ISRA [01:01:47]

Semua anggota KPU-nya atau satu orang?

424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [01:01:49]

Ketua dan anggota.

425. KETUA: SALDI ISRA [01:01:50]

Ketua dan anggota, ya?

426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [01:01:51]

Dan beberapa PPD.

427. KETUA: SALDI ISRA [01:01:52]

Penyelenggara (...)

428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [01:01:56]

Ya kami juga sudah laporkan ke DKPP.

429. KETUA: SALDI ISRA [01:01:58]

Ya, ini.

430. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [01:01:59]

Bahwa dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 ternyata terjadi praktik suap, yaitu uang sejumlah (...)

431. KETUA: SALDI ISRA [01:02:08]

Ya, itu sudah tadi, ya. Itu sudah. Pokoknya uang Rp200.000.000,00.

Oke, lanjut.

432. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [01:02:19]

Nomor 15 ... maaf 14.

Bahwa Termohon telah lalai ataupun dengan sengaja menerima pendaftaran pasangan calon yang tidak memenuhi syarat ataupun Termohon tidak melakukan pemeriksaan saksama atas dokumen dan berkas pendaftaran pasangan calon nomor ... pasangan calon dimana Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor 1 sampai dengan saat ini masih aktif sebagai anggota DPR Perwakilan Rakyat Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

433. KETUA: SALDI ISRA [01:02:47]

Oke, siapa? Siapa namanya? Ham Yogi itu?

434. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [01:02:50]

Ham Yogi, ya.

435. KETUA: SALDI ISRA [01:02:50]

Itu anggota DPR sekarang?

436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [01:02:52]

Ya.

437. KETUA: SALDI ISRA [01:02:54]

Anggota DPR dari Papua?

438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [01:02:57]

Dari kabupaten ... Kabupaten Paniai.

439. KETUA: SALDI ISRA [01:03:00]

Oh, jadi dia Anggota DPRP?

440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [01:03:02]

Bukan, Kabupaten.
Kabupaten (...)

441. KETUA: SALDI ISRA [01:03:03]

Oh, Anggota DPRD Kabupaten?

442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [01:03:06]

Paniai, ya.

443. KETUA: SALDI ISRA [01:03:07]

Paniai, ya. Dari partai apa?

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [01:03:07]

Kami tidak tahu.

445. KETUA: SALDI ISRA [01:03:13]

Anggota KPU Paniai? Betul Ham Yogi ini Anggota DPR kabupaten sekarang?

446. TERMOHON: PETRUS NAWIPA [01:03:21]

Izin Pimpinan ... izin, Majelis Hakim Yang Mulia, Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor 1 itu adalah Anggota DPR aktif di Kabupaten Paniai dan itu sudah diperlakukan sesuai ketentuan yang berlaku. KPU bahwa wajib (...)

447. KETUA: SALDI ISRA [01:03:40]

Sekarang masih aktif?

448. TERMOHON: PETRUS NAWIPA [01:03:40]

Ya, sudah mengajukan pengunduran diri dan bukti pengunduran diri, tanda terima sudah diserahkan ke KPU dan paslon wakil ... calon wakil bupati dinyatakan lolos dalam verifikasi administrasi. Terima kasih.

449. KETUA: SALDI ISRA [01:03:54]

Jadi, dia masih aktif sekarang, ya? Tapi sudah mengajukan pengunduran diri?

450. TERMOHON: PETRUS NAWIPA [01:03:58]

Sudah mengajukan pengunduran diri ke (...)

451. KETUA: SALDI ISRA [01:04:00]

Kapan itu?

452. TERMOHON: PETRUS NAWIPA [01:04:01]

Sejak tahapan pencalonan itu berjalan dan (...)

453. KETUA: SALDI ISRA [01:04:04]

Mengajukan pengunduran diri?

454. TERMOHON: PETRUS NAWIPA [01:04:05]

Ya, siap.

455. KETUA: SALDI ISRA [01:04:0]

Tapi belum diberhentikan?

456. TERMOHON: PETRUS NAWIPA [01:04:08]

Itu menjadi kewenangan ... kewenangan pihak berwenang.

457. KETUA: SALDI ISRA [01:04:14]

Ya.

458. TERMOHON: PETRUS NAWIPA [01:04:15]

Tapi faktanya masih anggota DPRD sampai sekarang?

459. TERMOHON: PETRUS NAWIPA [01:04:17]

Sudah mengajukan pengunduran diri dan (...)

460. KETUA: SALDI ISRA [01:04:19]

Bukan, pertanyaan saya yang dijawab. Masih jadi anggota DPRD, enggak?

461. TERMOHON: PETRUS NAWIPA [01:04:23]

Beliau anggota DPR aktif.

462. KETUA: SALDI ISRA [01:04:24]

Oke, terima kasih.
Lanjut.

463. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER

15. Bahwa proses Pleno di tingkat KPU Kabupaten Paniai di Aula Kantor KPU pada Tanggal 4 Desember 2024. Pleno kedua pada tanggal 6 Desember 2024. Pleno ketiga pada tanggal 8 Desember 2024 dan tanggal 11 Desember 2024 dan juga dilanjutkan pleno kabupaten ... Pleno di Kabupaten Paniai di Aula Hotel Mahavira Nabire pada Tanggal 13 Desember 2024. Dan tanggal 14 Desember diadakan Pleno di halaman depan pintu Gedung Aula RRI Nabire dalam keadaan berdiri tanpa diikuti saksi-saksi paslon.

16. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno rekapitulasi oleh Termohon yang dilaksanakan di lapangan RRI atau depan pintu RRI ... Aula RRI Nabire terjadi kekacauan atau chaos karena mendapat protes dan

keberatan dari saksi-saksi paslon dikarenakan pelaksanaan Rapat Pleno yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang seharusnya sebagaimana PKPU Nomor 18 Tahun 2024. Namun, Termohon mengabaikan keberatan saksi-saksi paslon dimana protes tersebut menimbulkan keributan dengan korban salah satu saksi terluka diduga dianiaya oleh seorang Komisioner KPU.

464. KETUA: SALDI ISRA [01:06:07]

Oke. Lanjut Pak, ya. Ini waktunya sudah habis ini. Langsung ke Petitum saja.

465. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [01:06:12]

15 dianggap dibacakan.

466. KETUA: SALDI ISRA [01:06:14]

Langsung Petitum, Pak.

467. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [01:06:15]

Langsung Petitum.

468. KETUA: SALDI ISRA [01:06:16]

Ya.

469. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [01:06:16]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada Hari Sabtu, tanggal 14 Desember Tahun 2024 pukul 22.15 WIT.

3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 yang sah dan benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

Nomot Urut ... langsung ke Nomor urut 4. Thomas Yeimo, S.STP., M.si, dan Yeri Adii, perolehan suara 48.320 suara

4. Atau memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kampung Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024.

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Hormat kami, Kuasa Pemohon.

470. KETUA: SALDI ISRA [01:07:39]

Oke.

471. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [01:07:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

472. KETUA: SALDI ISRA [01:07:41]

Itu Petitum angka 4 itu alternatif terhadap angka berapa? Kuasa Pemohon?

Kan ada *atau* itu. Itu alternatif terhadap 3, terhadap 2, atau terhadap apa?

473. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [01:07:57]

Alternatif terhadap 2 dan 3, Yang Mulia.

474. KETUA: SALDI ISRA [01:08:00]

Oh, alternatif terhadap 2 dan 3, betul?

475. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [01:08:05]

Izin, Yang Mulia. Alternatif terhadap 3.

476. KETUA: SALDI ISRA [01:08:07]

Saya tanya sekali lagi alternatif terhadap 2 nanti. Coba yakinkan betul.

477. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [01:08:13]

Izin, Yang Mulia. Alternatif terhadap Petitem nomor 2.

478. KETUA: SALDI ISRA [01:08:25]

Ini jadi nomor 4 ini alternatif terhadap petitum nomor 2?

479. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [01:08:28]

Betul.

480. KETUA: SALDI ISRA [01:08:30]

Ya, betul, ya?

481. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [01:08:31]

Betul, Yang Mulia.

482. KETUA: SALDI ISRA [01:08:31]

Oke, yakin?

483. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [01:08:32]

Yakin.

484. KETUA: SALDI ISRA [01:08:33]

Oke, terima kasih.

Ada yang mau dikomentari Pak Arsul? Cukup. Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup, ya.

485. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [01:08:47]

Izin, Yang Mulia, kami ingin menyampaikan tambahan alat bukti.

486. KETUA: SALDI ISRA [01:08:51]

Ya, nanti, ya.

487. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [01:08:52]

Baik, terima kasih.

488. KETUA: SALDI ISRA [01:08:53]

Kalau disampaikan sekarang, gimana lagi ini? Kan masih ada waktu.

489. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [01:08:57]

Siap.

490. KETUA: SALDI ISRA [01:08:58]

Sidang masih ada lagi nanti. Disampaikan nanti boleh, mungkin apa namanya ... verifikasinya baru nanti.

491. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: PERIATI GINTING [01:09:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

492. KETUA: SALDI ISRA [01:09:07]

Silakan, sekarang Paniai 298.

Jadi, ini ada 3 permohonan Paniai. Semuanya menyerang Nomor 1, tapi ada nomor-nomor lain menyerang nomor lain juga. Jadi, ada dia musuh kolektifnya, tapi satu antara lain saling serang juga. Nah, ini menariknya ini Paniai ini. Silakan.

493. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:09:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr.wb.

494. KETUA: SALDI ISRA [01:09:34]

Walaikumssalam wr.wb

495. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:09:35]

Izin menyampaikan selaku Kuasa Hukum, permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 48 dan seterusnya, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT.

496. KETUA: SALDI ISRA [01:09:47]

Ya, silakan.

497. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:09:50]

Dan seterusnya, Prinsipal dinyatakan dibacakan.
Kuasa hukum dinyatakan dibacakan.
Pemohon terhadap ... Pemohon terhadap Termohon.
Kewenangan MK dinyatakan dibacakan.
Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dinyatakan dibacakan.
Kedudukan Hukum dinyatakan dibacakan.
Poin 7, Yang Mulia, 5.

498. KETUA: SALDI ISRA [01:10:19]

Oke.

499. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:10:20]

Bahwa ... bahwa berdasarkan (...)

500. KETUA: SALDI ISRA [01:10:22]

Di halaman berapa itu?

501. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:10:23]

Halaman 5, poin 7. Halaman 5.

502. KETUA: SALDI ISRA [01:10:25]

Oke, silakan.

503. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:10:27]

Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 48 tentang (...)

504. KETUA: SALDI ISRA [01:10:31]

Ini kan mau menyatakan bahwa memohon untuk menerobos 158, ya?

505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:10:35]

Ya.

506. KETUA: SALDI ISRA [01:10:36]

Alasannya menerobos, itu yang disampaikan.

507. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:10:38]

Baik. Bahwa oleh karena selisih perolehan suara antar Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 belum memenuhi ketentuan dimaksud, namun telah terjadi pelanggaran yang sangat serius dan signifikan yang dilakukan oleh penyelenggara, KPU Kabupaten Paniai, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga sangat merugikan perolehan suara Pemohon. Oleh karenanya Pemohon memohon kepada MK dan seterusnya menunda dan mengesampingkan Pasal 158 dan seterusnya ... dan seterusnya.

Poin 8 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

508. KETUA: SALDI ISRA [01:11:27]

Ya, langsung ke Pokok Permohonan saja.

509. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:11:28]

Ya. Poin 1 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

510. KETUA: SALDI ISRA [01:11:36]

Ya. Itu halaman berapa?

511. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:11:38]

Poin 1 halaman 6 selanjutnya halaman 7, Yang Mulia. Bahwa angka 2. Bahwa selisih peroleh (...)

512. KETUA: SALDI ISRA [01:11:46]

Itu sudah, itu kan sudah dimintakan.

513. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:11:50]

Poin-poin yang kami bacakan yang dipertebal, Yang Mulia.

514. KETUA: SALDI ISRA [01:11:52]

Ya. Terserah Anda lah mana yang mau dibacakan, tapi tidak boleh lebih 15 menit, ya?

515. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:11:58]

Baik.

516. KETUA: SALDI ISRA [01:11:59]

Silakan.

517. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:11:59]

Bahwa selisih perolehan suara (...)

518. KETUA: SALDI ISRA [01:12:00]

Nanti begitu 15, saya injak remnya di sini.

519. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:12:02]

Siap. Pemohon dengan ... dengan Paslon 1 tersebut disebabkan karena terdapat pelanggaran-pelanggaran serius yang terjadi dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai karena terdapat dugaan upaya suap yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Paniai kepada kapolres, kabag Ops, dan Danton Brimob Yon C Nabire untuk mengamankan dan memuluskan perhitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Paniai untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, bernama Yampit Nawipa dan Ham Yogi.

Selanjutnya halaman 8, Yang Mulia. Terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai kepada KPU Kabupaten Paniai untuk membatalkan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Paniai untuk seluruhnya karena terdapat pelanggaran-pelanggaran serius dalam proke ... proses rekapitulasi yang di ... yang melibatkan penyelenggara Pilkada. Poin-poin dianggap dibacakan.

Angka 10, Yang Mulia ... halaman 10, Yang Mulia. Bahwa ka ... Bawaslu Kabupaten Paniai mengeluarkan rekomendasi dan menyampaikan rekomendasi dengan mendasari hal-hal yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di Kabupaten Paniai sesuai pemungut ... pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil pe ... penghitungan suara dan seterusnya. bupati dan wakil bupati, Yang Mulia.

520. KETUA: SALDI ISRA [01:13:30]

Lanjut.

521. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:13:32]

Lanjut halaman 13, Yang Mulia. Terdapat penolakan dan keberatan dari gabungan para Paslon Bupati dan Wakil Bupati, ter ... terhadap rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Paniai karena terdapat pelanggaran serius. Poin 1 sampai dengan seterusnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

522. KETUA: SALDI ISRA [01:13:52]

Ya.

523. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:13:53]

Kemudian langsung ke halaman 18, Yang Mulia. Perolehan suara masing-masing Paslon di setiap distrik Kabupaten Paniai, versi Pemohon dan Termohon.

1. Perolehan suara Distrik Muye menurut Pemohon sesuai dengan tabel yang kami sampaikan, dianggap dibacakan.

Kemudian Distrik Siriwo sesuai tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

524. KETUA: SALDI ISRA [01:14:21]

Ya.

525. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:14:23]

Distrik Aradide sesuai tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

526. KETUA: SALDI ISRA [01:14:30]

Lanjut.

527. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:14:34]

Lanjut.

Halaman 27, Yang Mulia.

528. KETUA: SALDI ISRA [01:14:35]

Ya.

529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:14:37]

Perolehan suara Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai, sesuai versi Pemohon dianggap dibacakan dan seterusnya.

Kemudian suara Distrik Kebo sesuai tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

530. KETUA: SALDI ISRA [01:14:53]

Ya.

531. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:14:54]

Distrik Yagai, Kabupaten Paniai dianggap dibacakan.

532. KETUA: SALDI ISRA [01:15:02]

Lanjut!

533. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:15:06]

Bahwa Distrik Paniai Timur, perolehan versi Pemohon=19.381, Termohon=11.372.

Bahwa ... angka 31, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat Desa Awabutu, Desa Kogekotu, Iyaitaka, dan Enarotali yang tertuang dalam ket ... kertas karton sebagaimana bukti foto dan C.Hasil Berita acara kesepakatan pembagian suara Pilkada di Kampung Enarotali berdasarkan kesepakatan masyarakat Distrik Paniai, suara Pemohon sebesar=19.381 suara.

534. KETUA: SALDI ISRA [01:15:54]

Terus!

535. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:15:54]

Paragraf bawah, bahwa faktanya logistik tidak ada yang turun di untuk 16 kampung, namun hanya 1 kampung, Enarotali, yang menerima logistik sehingga Pemohon hanya memiliki Formulir D ... C.Hasil KWK Bupati. Logistik untuk 16 kampung belum didistribusikan karena terdapat penolakan oleh masyarakat berkaitan belum ada kesepakatan perihal 30.023 DPT sehingga petugas KPU Paniai dan Bawaslu meninggalkan tempat dengan pesan kepada pihak agar keamanan tetap terjamin. Dan KPU Paniai meninggalkan PPD dan Pandis Paniai Timur agar sekiranya geser logistik ke setiap TPS.

536. KETUA: SALDI ISRA [01:16:35]

Lanjut.

537. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:16:37]

Lanjut halaman 36. Distrik Wegee Bino, suara Pemohon sesuai dengan tabel, Yang Mulia. Dianggap dibacakan.

538. KETUA: SALDI ISRA [01:16:46]

Ya.

539. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:16:49]

Lanjut, Distrik Wegee Muka, suara versi Pemohon sesuai tabel dianggap dibacakan.

540. KETUA: SALDI ISRA [01:16:52]

Oke.

541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:16:56]

Distrik Yatamo, suara Pemohon dan Termohon dianggap dibacakan. Distrik Aweida, suara Pemohon, versi Pemohon dianggap dibacakan.

542. KETUA: SALDI ISRA [01:17:11]

Semua distrik itu dianggap dibacakan, ya.

543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:17:13]

Siap, Yang Mulia.

544. KETUA: SALDI ISRA [01:17:14]

Lanjut.

545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:17:15]

Sampai dengan Distrik Youtadi, kemudian juga Distrik Pugo Dagi.

546. KETUA: SALDI ISRA [01:17:21]

Ya.

547. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:17:22]

Distrik Baya Biru, Distrik Topiyai.

548. KETUA: SALDI ISRA [01:17:35]

Terus?

549. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:17:37]

Distrik Teluk Deya dianggap dibacakan.

550. KETUA: SALDI ISRA [01:17:43]

Langsung Petitem. Ada lagi yang lain enggak di luar angka-angka itu yang mau disampaikan?

551. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:17:48]

Ada, Yang Mulia.

552. KETUA: SALDI ISRA [01:17:49]

Nah, silakan.

553. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:17:55]

Bahwa di poin halaman 53, perolehan suara di 24 Distrik Kabupaten Paniai berdasarkan C.Hasil dan C.Hasil Pleno kesepakatan masyarakat.

554. KETUA: SALDI ISRA [01:18:06]

Ya.

555. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:18:07]

Halaman 54, Yang Mulia, tabel paling bawah. Total perolehan suara Paslon 1 menjadi=23.082, Paslon 2=17.395, Paslon 3 menjadi=43.364, Paslon 4=18.071, Paslon 5=7.316.

556. KETUA: SALDI ISRA [01:18:28]

Oke.

557. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHMAD LEKSONO [01:18:29]

Petitum, Rekan kami, Yang Mulia.

558. KETUA: SALDI ISRA [01:18:30]

Silakan!

559. KUASA HUKUM PEMOHON 298: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [01:18:32]

Berdasarkan seluruh uraian yang sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Nomor 48 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut. 1. Paslon Nomor 1=23.082, Paslon Nomor 2=17.395, Paslon Nomor Urut 3=43.364, Paslon Nomor 4=18.271, Paslon Nomor 5=7.316.
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Paniai untuk melaksanakan putusan ini dan mempunyai hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi.

Atau.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 48.
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Paniai.
4. Memerintahkan KPU untuk mengganti seluruh komisioner KPU Kabupaten Paniai.
5. Memerintahkan Bawaslu RI untuk mengganti 2 anggota Bawaslu Kabupaten Paniai atas nama Saudara Lumi Yulimince Nawipa dan Manfred Dogoppia.

6. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi penyelenggaraan pemungutan suara ulang tersebut.
7. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi pengawasan dalam pelaksanaan amar putusan ini.
8. Memerintahkan kepada kap ... Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan, mengamankan proses pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai.
9. Memerintahkan kepada TNI beserta jajarannya, membantu mengamankan proses pemungutan suara ulang.
10. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Paniai untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.

560. KETUA: SALDI ISRA [01:20:19]

Terima kasih. Jadi, ini kalau dibaca, cukup, ya? Cukup.

Kalau dibaca ini ketiga-tiga Permohonannya dimasukkan angka yang menang menurut versi KPU, ini ada 4 pasangan calon yang menang. Dan kalau saya totalkan suaranya, klaim masing-masing itu totalnya menjadi 190.738 suara. Karena semuanya klaim menang itu. Nah, ini yang tanggung jawab KPU ini menjadi berat menjelaskannya, untuk menentukan mana yang akan dipedomani oleh Mahkamah, termasuk Bawaslu, ya. Ini yang terkait dengan Paniai ini.

Jadi, apa namanya ... sama dengan orang ini misalnya satu kelas kalau mau memilih ketua kelas, 3 pasangan calon bisik-bisik ke sini, "Saya sudah dapat 25 suara." Ini jumlah anggota kelasnya 40 orang. Di sini mengatakan, "Saya dapat 30." Di situ mengatakan, "Saya dapat 20," katanya, kan. Nah, kalau dihitung semuanya, tiga kali lipat orang dalam kelas itu. Ini kejadiannya ini. Tapi apa pun ini harus kita buktikan, mana di antara klaim ini yang benar. Oke, ya.

Yang Mulia Pak Arsul, ada yang mau ditambahkan? Cukup. Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup, ya.

Anda baru berhasil semuanya kalau bikin kami pusing. Tapi kalau kami masih senyum-senyum, itu belum berhasil namanya Para Kuasa Hukumnya. Tapi kalau kita sudah pusing Hakim, baru sukses Anda namanya.

Kita lanjut sekarang ke Labuhanbatu. Silakan! Ini Labuhanbatu ini tebal sekali ini.

561. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:22:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

562. KETUA: SALDI ISRA [01:22:13]

Kalau kita baca 1 halaman, ini sampai 3 hari ke depan belum selesai. Tapi, jatahnya tetap 15 menit. Silakan.

563. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:22:21]

Siap, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. Wb.

564. KETUA: SALDI ISRA [01:22:25]

Walaikumssalam wr. wb.

565. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:22:27]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Sengketa Pilkada Kabupaten Labuhanbatu.

Perkenalkan, saya Kuasa Hukum Akhyar Idris Sagala bersama rekan Jalaluddin. Dalam kesempatan ini karena Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 yang diajukan Pemohon, tentunya telah dimiliki pihak-pihak yang berhubungan dengan perkara ini. Maka, kami hanya menyampaikan poin-poin penting dari Pemohon kami sehingga dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

566. KETUA: SALDI ISRA [01:22:59]

Silakan. Apa yang penting-pentingnya itu?

567. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:23:02]

Siap, Yang Mulia.

568. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:23:03]

Pertama. Objek Permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 965 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024.

569. KETUA: SALDI ISRA [01:23:21]

Oke.

570. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:23:26]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

571. KETUA: SALDI ISRA [01:23:30]

Ya.

572. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:23:31]

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Kedudukan Pemohon dianggap dibacakan.

Selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 24.494, melebihi ambang batas. Namun, mohon dikesampingkan atas Pasal 158 dengan alasan karena terdapatnya pelanggaran.

1. Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, Pemilih yang (...)

573. KETUA: SALDI ISRA [01:24:00]

Berapa TPS di Labuhanbatu ini?

574. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:24:07]

704 TPS, Yang Mulia.

575. KETUA: SALDI ISRA [01:24:09]

Sebentar, saya catat dulu, ya.

576. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:24:10]

Ya, Yang Mulia.

577. KETUA: SALDI ISRA [01:24:12]

Sabar, sabar. 700 berapa TPS-nya?

578. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:24:15]

704, Yang Mulia.

579. KETUA: SALDI ISRA [01:24:17]

704 TPS. Berapa kecamatan?

580. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:24:20]

9 kecamatan, Yang Mulia.

581. KETUA: SALDI ISRA [01:24:22]

9 kecamatan. Oke, lanjut.

582. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:24:26]

Oke. Kami lanjut, Yang Mulia.

Kemudian terdapat pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih atau pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Kemudian (...)

583. KETUA: SALDI ISRA [01:24:38]

Kalau tidak terdaftar, boleh ikut memilih, kan?

584. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:24:41]

Boleh, Yang Mulia.

585. KETUA: SALDI ISRA [01:24:42]

Anda tahu kan aturannya?

586. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:24:43]

Tahu, Yang Mulia.

587. KETUA: SALDI ISRA [01:24:44]

Kenapa ini jadi masalah?

588. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:24:46]

KTP luar provinsi, Yang Mulia. Yang masih terdaftar di TPS lain, TPS asal.

589. KETUA: SALDI ISRA [01:24:51]

Oke. Ini KTP-nya luar provinsi?

590. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:24:53]

Luar provinsi, luar kabupaten, Yang Mulia.

591. KETUA: SALDI ISRA [01:24:53]

Ikut memilih?

592. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:24:56]

Ikut mencoblos.

593. KETUA: SALDI ISRA [01:24:57]

Ini Anda buktikan semua ini?

594. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:24:58]

Ada, Yang Mulia.

595. KETUA: SALDI ISRA [01:24:59]

Oke, lanjut.

596. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:25:01]

Kemudian terdapatnya kotak suara yang tidak bersegel dan terdapatnya amplop surat suara yang tidak bersegel atau berhologram dan terdapat pelanggaran TSM berupa keterlibatan aparatur pemerintahan dan aparat Polres Labuhanbatu dalam mengerahkan lurah dan kepala desa serta kepala lingkungan untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 2, Maya Hasmita (...)

597. KETUA: SALDI ISRA [01:25:25]

Nomor Urut 2, ini incumbent?

598. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:25:27]

Tidak, Yang Mulia.

599. KETUA: SALDI ISRA [01:25:27]

Apanya?

600. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:25:30]

Calon (...)

601. KETUA: SALDI ISRA [01:25:33]

Biasanya yang kayak gitu incumbent?

602. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:25:35]

Ya, Yang Mulia.

603. KETUA: SALDI ISRA [01:25:36]

Atau saudara Bupati yang berkuasa? Ini apa nih? Yang menang ini apa hubungannya?

604. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:25:39]

Ini istri mantan bupati, Yang Mulia.

605. KETUA: SALDI ISRA [01:25:43]

Oh, istri mantan, ya?

606. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:25:44]

Ya.

607. KETUA: SALDI ISRA [01:25:45]

Bukan, mantan istri bupati?

608. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:25:45]

Bukan, istri mantan bupati, Yang Mulia.

609. KETUA: SALDI ISRA [01:25:50]

Istri mantan bupati ya?

610. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:25:51]

Ya, Yang Mulia.

611. KETUA: SALDI ISRA [01:25:52]

Kalau, mantan istri kan lain lagi itu?

612. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:25:53]

Beda lagi, Yang Mulia.

613. KETUA: SALDI ISRA [01:25:56]

Silakan.

614. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:25:57]

Kemudian, Yang Mulia. Terlibat ... untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 yang tersebar di kecamatan dan kelurahan se-Kabupaten Labuhanbatu.

615. KETUA: SALDI ISRA [01:26:06]

Itu, bupati nya periode kapan yang bupati yang mantan itu?

616. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:26:10]

2020-2024, yang baru ditangkap KPK, Yang Mulia.

617. KETUA: SALDI ISRA [01:26:10]

Oh.

618. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:26:15]

Jadi istrinya sekarang yang mencalon ini, Yang Mulia.

619. KETUA: SALDI ISRA [01:26:15]

Menang pula, ya?

620. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:26:17]

Ya, menang pula, Yang Mulia.

621. KETUA: SALDI ISRA [01:26:19]

Kalau rezekinya menang, mau apa lagi kita?

622. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:26:19]

Ya, itu hak-hak politik, Yang Mulia.

623. KETUA: SALDI ISRA [01:26:23]

Silakan.

624. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:26:24]

Ya. Kemudian, Yang Mulia. Terkait ... kami lanjut tentang perolehan suara.

Pasangan Nomor Urut 1, Faizal Amri Siregar sebanyak 28.262.

Kemudian Pasangan Urut Nomor 2, Maya Hasmita 113.976.

Pasangan Nomor Urut 3 atau Pemohon 9 ... 89.482.

Total suara sah = 231.723 suara, Yang Mulia.

625. KETUA: SALDI ISRA [01:26:59]

Oke. Lanjut.

626. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:27:04]

Kami lanjut tentang hak pilih ... pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, Kecamatan Rantau Utara, kami anggap dibacakan, Yang Mulia

627. KETUA: SALDI ISRA [01:27:18]

Ini yang Anda munculkan di petitum ini, semua TPS yang bermasalah yang apa ... orang tidak berhak ikut memilih?

628. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:27:26]

Ya, Yang Mulia.

629. KETUA: SALDI ISRA [01:27:27]

Semuanya ini?

630. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:27:27]

Ya, Yang Mulia.

631. KETUA: SALDI ISRA [01:27:27]

Oke. Ini misalnya Kecamatan Rantau Utara, ada 44 TPS?

632. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:27:36]

Ya, Yang Mulia.

633. KETUA: SALDI ISRA [01:27:37]

Kecamatan Rantau Selatan, ada 42 TPS?

634. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:27:41]

Ya, Yang Mulia.

635. KETUA: SALDI ISRA [01:27:42]

Kecamatan Bilah Hulu, ada 46 TPS?

636. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:27:42]

Ya, Yang Mulia.

637. KETUA: SALDI ISRA [01:27:49]

Dan, TPS lainnya, kecamatan Bilah Barat.

638. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:27:52]

Ya, Yang Mulia.

639. KETUA: SALDI ISRA [01:27:55]

Ada 8 TPS. Kecamatan Pangkatan, 11 TPS.

640. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:27:55]

Ya, Yang Mulia.

641. KETUA: SALDI ISRA [01:28:00]

Oke, lanjut.

642. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:28:06]

Oke, Yang Mulia.

Kemudian daftar pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau yang berbeda, Kecamatan Rantau Utara kami anggap dibacakan.

643. KETUA: SALDI ISRA [01:28:15]

Ya.

644. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:28:17]

Kemudian pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, Kecamatan Rantau Selatan dianggap dibacakan.

645. KETUA: SALDI ISRA [01:28:26]

Ya.

646. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:28:27]

Kemudian pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda di Kecamatan Bilahulu dianggap dibacakan.

Kemudian pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih berdasarkan nomor induk KTP atau pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS Kecamatan Rantau Utara dianggap dibacakan.

Kami lanjut, Yang Mulia. Kemudian nama pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih atau pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS di Kecamatan Rantau Selatan dianggap dibacakan.

Kemudian nama pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih atau pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS di kec ... di Kecamatan Bilahulu dianggap dibacakan.

647. KETUA: SALDI ISRA [01:29:21]

Oke. Kalau itu saja semua dianggap dibacakan, ya?

648. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:29:25]

Ya, Yang Mulia.

649. KETUA: SALDI ISRA [01:29:26]

Anda lanjut ke Petitem. Ada atau ada hal lain yang (...)

650. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:29:30]

Ada. Ada, Yang Mulia. Terkait TSM, Yang Mulia.

651. KETUA: SALDI ISRA [01:29:32]

Di halaman berapa itu?

652. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:29:33]

Mulai dari halaman 139, Yang Mulia.

653. KETUA: SALDI ISRA [01:29:41]

Oke, ini paling tebal ini yang kita miliki ini. Oke, penyelenggara Pilkada Labuhanbatu turut memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2? Nah, gimana ceritanya ini?

654. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:29:50]

Ya, terima kasih Yang Mulia.

655. KETUA: SALDI ISRA [01:29:52]

Ya.

656. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:29:52]

Bahwa adanya kerja sama antara pemenang Pasangan Nomor Calon Urut 2, Termohon mengangkat perangkat desa/kepala dusun menjadi KPPS, Yang Mulia. Kemudian ditemukannya fakta adanya keterlibatan KPU Kabupaten Labuhanbatu yang sengaja mempersempit waktu bagi Pemohon untuk melakukan persiapan Permohonan PHPU dan memaksakan melakukan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati Wakil Bupati Labuhanbatu

tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024.

657. KETUA: SALDI ISRA [01:30:32]

Mempersempit waktunya apa maksudnya? Supaya tidak bisa mendaftar ke MK begitu?

658. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:30:38]

Ya, Yang Mulia. Jadi kita tidak sempat saksi kita, tidak sempat meminta (...)

659. KETUA: SALDI ISRA [01:30:41]

Saksi kami gitu.

660. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:30:43]

Ya, saksi kami tidak sempat ... apa namanya ... meminta apa penjelasan dari KPU terkait adanya lebih dari seorang di tiap TPS itu mencoplos dengan KTP luar. Namun Pihak Termohon ini tidak menghiraukan (...)

661. KETUA: SALDI ISRA [01:31:03]

Pertanyaan saya sekarang, ini berapa TPS yang bermasalah menurut, Bapak, ini?

662. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:31:06]

Total itu 177 TPS, Yang Mulia.

663. KETUA: SALDI ISRA [01:31:13]

177 TPS.

664. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:31:13]

Ya, Yang Mulia.

665. KETUA: SALDI ISRA [01:31:14]

Pertanyaan saya, dari 177 TPS itu saksiya tanda tangan atau tidak?

666. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:31:17]

Saksi untuk kita itu kemarin ada yang tanda tangan, ada yang tidak, Yang Mulia.

667. KETUA: SALDI ISRA [01:31:24]

Jadi, ada yang tanda tangan ada yang tidak, ya?

668. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:31:26]

Ya, Yang Mulia. Jadi, di 177 TPS ini yang kita persoalkan itu banyaknya pemilih yang tidak berhak KTP luar.

669. KETUA: SALDI ISRA [01:31:37]

Ya, itukan sudah.

670. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:31:37]

Dan ketahuannya pada saat di PPK.

671. KETUA: SALDI ISRA [01:31:37]

Pertanyaan saya gini, itu saksi Bapak, saksi Bapak itu tanda tangan enggak di TPS itu?

672. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:31:46]

Ada yang tanda tangan, ada yang tidak, Yang Mulia.

673. KETUA: SALDI ISRA [01:31:44]

Oke, kalau begitu saya spesifik. Dari 177 TPS yang dipersoalkan, itu berapa TPS yang tidak tanda tangan dan berapa TPS yang tanda tangan?

674. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:31:54]

Belum dapat kita, Yang Mulia.

675. KETUA: SALDI ISRA [01:31:56]

Kok belum dapat?

676. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:31:58]

Karena kita belum bisa mendapatkan akses C.1 Plano juga, Yang Mulia. Siapa saksi yang hadir?

677. KETUA: SALDI ISRA [01:32:03]

Bukan, Bapak kan harusnya Saksi Bapak itu setor ke Bapak, "Ini saya dari TPS." Diserahkan atau tidak?

678. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:32:09]

Saksi ada yang menyerahkan, ada yang tidak ini, Yang Mulia.

679. KETUA: SALDI ISRA [01:32:10]

Nah, dari mana Bapak dapat angka 177, itu?

680. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:32:14]

Ya, dari daftar hadir DPTb di setiap TPS, Yang Mulia.

681. KETUA: SALDI ISRA [01:32:19]

Ya, oke.

682. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:32:20]

Yang harusnya sebenarnya ini kan di DPK dibuat daftar hadir.

683. KETUA: SALDI ISRA [01:32:24]

Ya.

684. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:32:24]

Tapi ditempatkan penyelenggara, ini DPTb.

685. KETUA: SALDI ISRA [01:32:25]

Ya.

686. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:32:26]

KTP-KTP luar ini, Yang Mulia.

687. KETUA: SALDI ISRA [01:32:29]

DPTb boleh kan, Pak?

688. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:32:29]

Boleh, Yang Mulia.

689. KETUA: SALDI ISRA [01:32:30]

Ya. Kalau boleh apa masalahnya lagi?

690. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:32:32]

Ya, karena ini KTP luar tidak membawa A-5 KWK.

691. KETUA: SALDI ISRA [01:32:35]

Nah saya spesifikkan, berapa jumlah yang pakai D apa itu ... KTP yang bukan KTP provinsi yang bersangkutan?

692. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:32:44]

Ada di 3 kecamatan, Yang Mulia.

693. KETUA: SALDI ISRA [01:32:47]

Bukan, kalau saya tanya itu jumlahnya berapa, 1.000 orang, 10.000 ribu orang atau berapa?

694. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:32:54]

Di pengantar bukti sudah kami sampaikan, Yang Mulia. Ada lebih Lebih dari 700 orang, Yang Mulia, di 3 kecamatan.

695. KETUA: SALDI ISRA [01:33:02]

Lebih dari 700 orang di 3 kecamatan.

696. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:33:05]

Setiap kecamatan. Ya, Yang Mulia.

697. KETUA: SALDI ISRA [01:33:07]

Itu Anda sebutkan dimana dalam permohonan ini?

698. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:33:09]

Di pengantar bukti disampaikan, Yang Mulia.

699. KETUA: SALDI ISRA [01:33:12]

Bukan, dalam permohonan di mana?

700. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:33:15]

Di setiap daftar nama-nama itu disebutkan, Yang Mulia.

701. KETUA: SALDI ISRA [01:33:18]

Anda ngerti enggak pertanyaan saya?

702. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:33:21]

Ya, mengerti, Yang Mulia.

703. KETUA: SALDI ISRA [01:33:23]

Nah, itu belum-belum pertanyaan yang dijawab itu.

704. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:33:26]

Ya, contohnya ini, Yang Mulia.

705. KETUA: SALDI ISRA [01:33:35]

Oke lanjut. Dari pada pusing pula saya mendengar jawaban Anda ini.

706. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:33:40]

Ya.

707. KETUA: SALDI ISRA [01:33:40]

Silakan.

708. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:32:42]

Kalau buktinya di setiap tabel yang dibacakan tadi sudah dituliskan, Yang Mulia.

709. KETUA: SALDI ISRA [01:33:48]

Ya, kalau permohonan itu, kalau yang bagus itu ya bilang gini, "Ini yang kita temukan yang pakai KTP yang tidak dari provinsi yang bersangkutan, sekian jumlahnya". Lalu diurai ini, ini kejadiannya. Ada begini enggak di sini?

710. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:34:04]

Tidak begitu dibuat, Yang Mulia. Berdasarkan daftar hadir di DPTB itu kita tuliskan dan kita tuliskan buktinya berdasarkan daftar hadir dan DPT online, Yang Mulia.

711. KETUA: SALDI ISRA [01:34:13]

Oke. Ada lagi yang mau disampaikan?

712. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:34:16]

Ada, Yang Mulia.

713. KETUA: SALDI ISRA [01:34:16]

Nah, silakan.

714. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:34:18]

Terkait penyelenggara Pilkada Labuhanbatu melakukan pelanggaran dan pembiaran.

715. KETUA: SALDI ISRA [01:34:25]

Apa itu pelanggaran dan pembiarannya?

716. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:34:30]

Seperti di KPPS TPS 9 Sirandorong, Kecamatan Rantau Utara. Sebelum penghitungan suara C-1 Plano ditandatangani terlebih dahulu oleh KPPS sebelum adanya perhitungan suara.

717. KETUA: SALDI ISRA [01:34:43]

Jadi, sebelum penghitungan suara sudah ditandatangani apanya?

718. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:34:46]

Sudah ditandatangani, Yang Mulia.

719. KETUA: SALDI ISRA [01:34:47]

Apanya yang ditandatangani?

720. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:34:49]

C-1 Planonya, Yang Mulia.

721. KETUA: SALDI ISRA [01:34:50]

C-1 Planonya.

722. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:34:51]

Ya ... ya.

723. KETUA: SALDI ISRA [01:34:51]

Tapi belum diisi?

724. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:34:52]

Belum diisi, perhitungan pun belum, Yang Mulia.

725. KETUA: SALDI ISRA [01:34:54]

Ya kan tanda tangan enggak apa-apa dulu, nanti kan baru diisi.

726. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:34:57]

Prosedurnya enggak boleh, Yang Mulia. Harus dihitung dulu.

727. KETUA: SALDI ISRA [01:35:00]

Oke, apa lagi?

728. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:35:02]

Kemudian pokoknya (...)

729. KETUA: SALDI ISRA [01:35:03]

Tapi, saksi Anda membenarkan itu?

730. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:35:05]

Ada, Yang Mulia.

731. KETUA: SALDI ISRA [01:35:06]

Maksudnya, itu enggak diprotes sama Saksi Anda?

732. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:35:09]

Oh tidak, saksi dari paslon lain menemukan bukti itu, Yang Mulia.

733. KETUA: SALDI ISRA [01:35:13]

Bukan yang Saya tanya, saksi pasangan calon Anda protes atau tidak?

734. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:35:17]

Di situ tidak ada saksi, Yang Mulia.

735. KETUA: SALDI ISRA [01:35:18]

Oh, di situ tidak ada saksi. Keberatannya dicatat atau tidak?

736. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:35:23]

Keberatannya tidak ada, Yang Mulia.

737. KETUA: SALDI ISRA [01:35:25]

Gimana kita mau membenarkan?

738. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:35:27]

Tapi, terkait itu sudah dilaporkan ke Bawaslu, Yang Mulia.

739. KETUA: SALDI ISRA [01:35:31]

Saya ini lain yang saya tanya, lain yang Anda jawab.

740. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:35:33]

Ya, Yang Mulia.

741. KETUA: SALDI ISRA [01:33:34]

Lanjut, apa lagi yang mau disampaikan?

742. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:35:38]

Keterlibatan Aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu untuk memenangkan pasangan Nomor Urut 2, Yang Mulia.

743. KETUA: SALDI ISRA [01:35:42]

Apa bentuk keterlibatannya?

744. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:35:44]

Pertama. Camat Rantau Utara. Nafsir Rambe mengumpulkan para lurah se-Kecamatan Rantau Utara untuk mengarahkan para lurah memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sesuai Bukti P-663, Yang Mulia.

745. KETUA: SALDI ISRA [01:35:57]

Kapan kejadiannya?

746. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:35:59]

Sebelum pemilihan, Yang Mulia.

747. KETUA: SALDI ISRA [01:36:00]

Ya. Sebelum pemilihan itu kan panjang, Pak.

748. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:36:03]

Di, ya, di P-663, Yang Mulia.

749. KETUA: SALDI ISRA [01:36:08]

Jadi gini, makanya saya bilang, para lawyer ini harus juga mengerti prinsip 5W1H. Siapa, bagaimana, kapan, dan di mananya itu harus jelas semuanya, ya?

750. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:36:38]

Ya, Yang Mulia.

751. KETUA: SALDI ISRA [01:36:08]

Ini permohonannya tebal, tapi kita ndak ada penerangan yang jelas ini. Silakan, kapan ini kejadiannya?

752. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:36:38]

Sebentar, Yang Mulia.

753. KETUA: SALDI ISRA [01:36:39]

Ya.

754. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:36:39]

Boleh dibuka pengantar buktinya? Dibuka file terbuhtinya. P-663.

755. KETUA: SALDI ISRA [01:36:39]

Tapi, ada dalam bukti, ya. Biar, kita lihat nanti.

756. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:37:13]

Ada, Yang Mulia (...)

757. KETUA: SALDI ISRA [01:37:13]

Anda lanjutkan.

758. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:37:16]

Di pengantar bukti, ada, Yang Mulia.

759. KETUA: SALDI ISRA [01:37:17]

Ya.

760. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:37:18]

Kemudian Camat Rantau selatan mengumpulkan para lurah dan mengatakan kepada lurah untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 2, Yang Mulia sesuai dengan bukti rekaman.

Kemudian Camat Panai Hilir mengumpulkan kepala desa untuk mengerahkan para kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Camat Bilah Barat mengumpulkan kepala desa untuk mengerahkan kepala desa untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 2.

Camat Bilah Hulu mengumpulkan kepala desa untuk mengerahkan para kepala desa dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan calon wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 dan calon wakil bupati Pasangan Nomor Urut 2, Jamri, S.T. mengumpulkan 5 kepala desa dan Ketua Apdesi untuk mengerahkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sesuai bukti rekaman video dan laporan, Yang Mulia.

761. KETUA: SALDI ISRA [01:38:05]

Oke, gini, apa lagi ini kan sudah lebih 15 menit ini.
Langsung petitum sajalah, ya?

762. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:38:16]

Ya, Yang Mulia.

763. KETUA: SALDI ISRA [01:38:17]

Oke. Petitum Anda juga panjang halamannya ini.
Silakan.

764. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:38:21]

Terakhir, Yang Mulia, ada lagi.

765. KETUA: SALDI ISRA [01:38:22]

Apa lagi?

766. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:38:23]

Sedikit, masalah Pasangan Calon Nomor Urut 2, money politic, Yang Mulia.

767. KETUA: SALDI ISRA [01:38:27]

Oh, apa itu bentuk money politic-nya?

768. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:38:29]

Bahwa Saksi Budi Tanjung selaku Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2.

769. KETUA: SALDI ISRA [01:38:37]

Ya.

770. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:38:37]

Melakukan money politic di Panai Hilir membagi-bagi uang, Yang Mulia.

771. KETUA: SALDI ISRA [01:38:43]

Bagi-bagikan uang itu berapa?

772. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:38:45]

Rp200.000,00, Yang Mulia.

773. KETUA: SALDI ISRA [01:38:47]

Per orang?

774. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:38:48]

Menurut video banyak, Yang Mulia.

775. KETUA: SALDI ISRA [01:38:51]

Menurut video.

776. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:38:51]

Menurut video.

777. KETUA: SALDI ISRA [01:38:52]

Menurut video gimana video mau cerita?
Saya tanya itu, berapa masing-masing orang menerima?

778. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:38:57]

Rp200.000,00, Yang Mulia.

779. KETUA: SALDI ISRA [01:39:59]

Rp200.000,00 yang menerima berapa orang?

780. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:40:02]

Lebih dari 10 orang, Yang Mulia.

781. KETUA: SALDI ISRA [01:40:03]

Lebih dari?

782. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:40:04]

10 orang, Yang Mulia. Di video.

783. KETUA: SALDI ISRA [01:40:05]

Di videonya ya? Oke.

784. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:40:06]

Ya, Yang Mulia.

785. KETUA: SALDI ISRA [01:40:07]

Ada, videonya ya.

786. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:40:08]

Ada, Yang Mulia.

787. KETUA: SALDI ISRA [01:40:09]

Oke, apa lagi?

788. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:40:11]

Petitum, Yang Mulia.

789. KETUA: SALDI ISRA [01:40:12]

Lanjut, Petitum jangan Anda baca semua Petitumnya. Petitumnya saja 12 halaman ini.

790. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKHYAR IDRIS SAGALA [01:40:18]

Baik, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian yang sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan berita acara KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 432/PL.02.3/1210/2024 tanggal 22 September 2024.
3. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuan Batu Nomor 965 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu Tahun 2024 berdasarkan bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember, sepanjang perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Dr. Hj. Maya Hasmita dan H. Jamri.

4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor 3 atas nama Hendri Syahputra Daulay dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M., selaku pemenang Pemilihan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024, dengan perolehan suara 89.482.
5. Memerintahkan kepada KPU Labuhanbatu untuk menerbitkan keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor 3 atas nama Hendri Syahputra Daulay dan Hj. Ellya Rosa Siregar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2024 dengan perolehan suara 89.482 suara.

791. KETUA: SALDI ISRA [01:40:52]

Oke.

792. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: JALALUDDIN [01:40:52]

Atau tidak setidaknya.

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 965 tentang Pemilihan Hasil Bupa ... Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 sepanjang perolehan suara masing-masing pada pasangan calon di TPS-TPS sebagaimana yang telah diuraikan di Petikum, Kecamatan Rantau Utara 44 TPS (...)

793. KETUA: SALDI ISRA [01:41:20]

Oke.

794. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: JALALUDDIN [01:41:21]

Kecamatan Rantau Selatan 42 TPS.

795. KETUA: SALDI ISRA [01:41:22]

Ya.

796. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: JALALUDDIN [01:41:23]

Kecamatan Bilah Hulu 46 TPS, Kecamatan Bilah Barat 8 TPS, Kecamatan Panai Tengah 6 TPS, Kecamatan Panai Hulu=13 TPS, Kecamatan Panai Hilir 7 TPS.

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 di TPS-TPS, sebagai berikut. Kecamatan Rantau Utara (...)

797. KETUA: SALDI ISRA [01:41:56]

Sama, dengan di atas, ya?

798. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: JALALUDDIN [01:41:57]

Sama, Yang Mulia.

799. KETUA: SALDI ISRA [01:42:58]

Apa lagi? Lanjut.

800. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: JALALUDDIN [01:43:03]

Dalam jangka waktu 30 hari kerja setelah putusan ini.

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Yang Mulia.

801. KETUA: SALDI ISRA [01:43:18]

Oke. Terima kasih.

Ini Permohonan paling tebal ini. Jadi, KPU Kabupaten Labuhanbatu itu harus menjelaskan setiap TPS yang disebut di situ, benar atau tidaknya. Agak-agak berat pekerjaan KPU ini. Mana KPU Labuhanbatu, ada? Ya, Bu, ya? Ibu tuh harus jawab dalil semuanya.

Ada yang mau dikomentari, Yang Mulia Pak Arsul? Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup, ya? Cukup, Labuhanbatu cukup.

Sekarang Kabupaten Toba. Yang ini pindah dulu ke belakang, biar naik ... apa ... penumpang baru. Toba, mana? Silakan.

802. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:43:57]

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Hukum dari Pemohon Kabupaten Toba akan membacakan permohonannya.

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Toba.

Selanjutnya, dianggap dibacakan.

Kemudian, adapun alur permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut.

1. Pengantar Pemohon diantar ... dianggap sudah dibacakan.

803. KETUA: SALDI ISRA [01:44:42]

Ya.

804. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:44:44]

Yang kedua, Kewenangan Mahkamah. Menurut Pemohon bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan ini.

805. KETUA: SALDI ISRA [01:44:53]

Ya.

806. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:44:54]

Selanjutnya, dianggap dibacakan.

Ketiga, Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Pemohon bahwa Pemohon mempunyai kedudukan untuk mengajukan permohonan. Selanjutnya dianggap dibacakan.

807. KETUA: SALDI ISRA [01:45:08]

Ya.

808. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:45:10]

Tenggang waktu, tenggang waktu (...)

809. KETUA: SALDI ISRA [01:45:14]

Ini Bapak ini bikin model baru, ya, di permohonan ini. Bahwa yang di Perbaikan Permohonan itu hanya soal Petitum saja, sementara yang lainnya itu masih memakai permohonan pertama, ya.

810. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:45:31]

Ya, siap, Yang Mulia.

811. KETUA: SALDI ISRA [01:45:33]

Oke. Ini biar semua klir ini, Pak.

812. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:45:35]

Tenggang waktu.

813. KETUA: SALDI ISRA [01:45:33]

Ya.

814. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:45:37]

Bahwa tenggang waktu yang diajukan permohonan ini adalah 3 hari setelah ditetapkannya perolehan suara itu. Jadi, sehingga (...)

815. KETUA: SALDI ISRA [01:45:45]

Kapan ditetapkan ini, Pak?

816. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:45:47]

Ditetapkan tanggal 4 Desember 2024.

817. KETUA: SALDI ISRA [01:45:51]

4 Desember itu hari apa, Pak, ya?

818. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:45:55]

Ya, jadi ... se ... kami (...)

819. KETUA: SALDI ISRA [01:45:56]

Hari apa 4 Desember?

820. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:45:58]

Hari Rabu, 4 Desember 2024, pukul 16.00 WIB.

821. KETUA: SALDI ISRA [01:46:01]

Oke.

822. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:46:03]

Ya. Pemohon mengajukan permohonan tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.59 WIB, sehingga tenggang waktu (...)

823. KETUA: SALDI ISRA [01:46:11]

Masih, ya?

824. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:46:13]

Masih.

825. KETUA: SALDI ISRA [01:46:15]

Oke.

826. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:46:15]

Selanjutnya, dianggap dibacakan

827. KETUA: SALDI ISRA 01:46:17]

Ya.

828. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:46:18]

Yang kelima, Pokok Permohonan.

1. Bahwa Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Dr. Robinson Sitorus S.H., M.H, dengan pasangannya Tonny Simanjuntak S.E. sebagai peserta Pemilukada Tahun 2024 tanpa

mengajukan pengunduran diri. Dr. Robinson Sitorus, S.H., M.H, sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa sesuai dengan informasi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN Nomor 10627/B-Mp.03.01/SD/D.IV/2024 tentang status PNS atas nama Robinson Sitorus, S.H.,M.H. masih PNS aktif.

3. Bahwa keikursertaan Paslon Dr. Robinson Sitorus, Nomor Urut 2 sangat mengganggu dan menggerus Perolehan Suara Nomor Urut 1 sehingga Dr. Robinson Sitorus S.H., M.H. tidak berhak mendapat suara pemilih karena keikursetan Paslon Nomor 2 cacat hukum dan harus batal demi hukum atau dibatalkan.

Selanjutnya, Yang Mulia. Karena memang ini penambahan, langsung ke penambahan, Yang Mulia, kami bacakan.

829. KETUA: SALDI ISRA [01:47:49]

Ya.

830. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:47:56]

Perubahan dengan menambah uraian pada Pokok Permohonan dari permohonan. Pemohon dan permohonannya, sebelumnya.

1. Bahwa Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Urut 2, yaitu Dr. Robinson Sitorus, S.H., MH dan pasangan Tonny Simanjutak, S.E. sebagai peserta Pemilukada Tahun 2024 tanpa mengunjurk ... mengajukan pengunduran diri.

831. KETUA: SALDI ISRA [01:48:18]

Itu sudah. Jangan Bapak ulang lagi itu, Pak. Pak, yang lain apa lagi?

832. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:48:23]

Oke, diganti dengan menambah uraian permohonan menjadi 1, 2, 3, dianggap sudah dibacakan.

Berikutnya, ada Calon Bupati Peserta Pilkada Kabupaten Toba belum mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pener ... PNS, tapi lolos sebagai Peserta Pilkada dengan Nomor Urut 2.

4. Bahwa Paslon Bupati Dr. Robinson Sitorus dengan pasangan Tonny Simanjutak, S.E. berharap dapat mengumpulkan suara dari Marga Narasaon yang terdiri dari Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait, dan Marga Butar-Butar yang merupakan kakak beradik atau bersaudara.

Bahwa Paslon Bupati, Robinson Sitorus, S.H., M.H. dengan pasangan Tonny Simanjutak, S.E. juga berharap dapat mengumpulkan suara Pangulu Ponggok Naiborngin yang terdiri dari Marga Hutajulu, Marga Hutahean, dan Marga Aruan.

6. Bahwa sama halnya dengan Paslon Bupati (...)

833. KETUA: SALDI ISRA [01:49:29]

Itu yang Bapak bacakan, halaman berapa, Pak?

834. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:49:31]

Dalam perubahan halaman nomor 3, Yang Mulia.

835. KETUA: SALDI ISRA [01:49:35]

Halaman nomor 3?

836. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:49:37]

Ya, Yang Mulia.

837. KETUA: SALDI ISRA [01:49:39]

Halaman 3 dari 7, poin berapa, Pak?

838. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:49:42]

Sekarang, ya kelima, Yang Mulia.

839. KETUA: SALDI ISRA [01:49:42]

Oke.

840. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:49:48]

Saya lanjut, Yang Mulia.

841. KETUA: SALDI ISRA [01:49:48]

Ya.

842. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:49:50]

Bahwa Paslon Bupati ... Saya lanjutkan Nomor 6. Bahwa sama halnya dengan Paslon Bupati Ir. Poltak Sitorus - Anugerah Puriam Naiborhu, S.P. juga berharap besar dapat mengumpulkan suara dari Marga Narasaon, yang terdiri dari Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait, dan Marga Butar-Butar yang merupakan kakak beradik bersaudara.

Bahwa begitu juga Paslon Bupati Ir. Poltak Sitorus - Anugerah Puriam Naiborhu juga berharap dapat mengumpulkan suara Pangulu Ponggok Naiborngin yang terdiri dari Marga Hutajulu, Marga Hutahaeon, dan Marga Aruan.

Yang ke-8. Bahwa jumlah Penduduk se-Kabupaten Toba yang bermarga Narasaon yang terdiri dari Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait, dan Marga Butar-Butar serta Marga Pangulu Ponggok Naiborngin yang terdiri dari Marga Hutajulu, Marga Hutahaeon, dan Marga Aruan yang berusia 17 tahun ke atas adalah sebanyak 32.694 orang yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dianggap dibacakan.

843. KETUA: SALDI ISRA [01:51:01]

Ya.

844. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:51:05]

9. Bahwa Calon Bupati Kabupaten Toba, Dr. Robinson Sitorus, dan Calon Bupati Kekupatan Toba ... Calon Bupati Kabupaten Toba, Ir. Poltak Sitorus sama-sama segmen perolehan suara Marga Narasaon yang terdiri dari Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait, dan Marga Butar-Butar serta Marga Pangulu Ponggok Naiborngin yang terdiri dari Marga Hutajulu, Marga Hutahaeon, dan Marga Aruan.

Bahwa dengan diikustertakannya sebagai peserta Pilkada Kabupaten Toba, Paslon Nomor 2, Dr. Robinson Sitorus, S.H., MH sama pasangan Tonny Simanjuntak S.E. sudah pasti mengurangi atau menggerus perolehan suara peserta Paslon Bupati Nomor 1 yaitu Ir. Poltak Sitorus - Anugerah Puriam Naiborhu, S.P ...

11. Bahwa adapun alasan Pemohon mengatakan pasti mengurangi atau menggerus perolehan suara peserta Paslon Bupati.

845. KETUA: SALDI ISRA [01:52:08]

Sudah, ini Pak ya, yang berkaitan dengan raihan suara dari marga-margan itu kita anggap sudah selesai diucapkan.

846. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:52:08]

Oke, siap.

847. KETUA: SALDI ISRA [01:52:14]

Yang lain, Pak, apa lagi yang mau disampaikan?

848. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:52:19]

Selanjutnya, Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 dilakukan dengan melanggar hukum sehingga harus dibatalkan atau batal demi hukum.

849. KETUA: SALDI ISRA [01:52:25]

Oke.

850. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:52:27]

16. Bahwa calon Bupati Dr. Robinson Sitorus dengan Nomor Urut 2 adalah Pegawai Negeri Sipil atau PNS di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

17. Bahwa sesuai dengan informasi. Oke, tadi sudah kami bacakan.

851. KETUA: SALDI ISRA [01:52:49]

Sudah.

852. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:52:50]

18. Bahwa dengan demikian, Dr. Robinson Sitorus, S.H., M.H., belum mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil padahal sudah ikut konsistentan sebagai Calon Bupati Kabupaten Toba yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024.

19. Bahwa undang-undang telah mengatur apabila pegawai negeri sipil atau PNS mencalonkan diri sebagai calon bupati atau wakil bupati

harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 7 ayat (2) huruf t yang berbunyi, "Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, ser ... serta Calon Wali Kota dan Wali ... Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

... huruf t, mengatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan."

20. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Perkara Nomor 41/PPU[!sic]-XII/2014 dengan amar, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon, melainkan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dan pemilu presiden, wakil presiden, serta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah.

853. KETUA: SALDI ISRA [01:55:00]

Oke, Petitem.

854. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARUDUT HUTAJULU [01:55:03]

Petitem. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.

855. KETUA: SALDI ISRA [01:55:05]

Silakan.

856. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: HOBBIN GULTOM [01:55:07]

Terima kasih, Yang Mulia.
Mohon izin, bacakan Petitem, Yang Mulia.

857. KETUA: SALDI ISRA [01:55:09]

Ya.

858. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: HOBBIN GULTOM [01:55:10]

Berdasarkan, seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2004 ... Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 sepanjang menyangkut Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Dr. Robinson Sitorus, S.H., M.H., dan pasangan Tony Simajuntak, S.E.,
3. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2.136 tahun 2024, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 sepanjang pemungutan suara yang dilaksanakan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Robinson Sitorus, S.H., M.H., Tonny Simajuntak, S.E. batal demi hukum karena Dr. Robinson Sitorus, S.H., M.H. ikut sebagai calon bupati, tapi belum mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Toba untuk melakukan pilkada ulang di Kabupaten Toba dengan pasangan calon insinyur ... dengan pasangan calon, Ir. Poltak Sitorus - Anugerah Puriam Naiborhu dan pasangan calon Effendi Sintong Panganian Napitupulu - Drs. Audi Murphy Sitorus, S.H., M.Si.
6. Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Toba.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, untuk melaksanakan putusan ini.

atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian, Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

859. KETUA: SALDI ISRA [01:57:21]

Horas.

860. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: HOBBIN GULTOM [01:57:22]

Horas.

861. KETUA: SALDI ISRA [01:57:20]

Mana ini KPU Toba? Ya, duduk di situ Pak, tolong kasih mik!

862. TERMOHON: RIDUAN MARPAUNG [01:57:34]

Siap, Yang Mulia.

863. KETUA: SALDI ISRA [01:57:34]

Tolong Bapak jelaskan sedikit, itu Robinson Sitorus sudah mengundurkan diri atau belum?

864. TERMOHON: RIDUAN MARPAUNG [01:57:38]

Siap, Yang Mulia. Sudah, Yang Mulia, sesuai dengan syarat pencalonan, bahwa (...)

865. KETUA: SALDI ISRA [01:57:45]

Bapak ada surat pengunduran dirinya?

866. TERMOHON: RIDUAN MARPAUNG [01:57:49]

Ada, Yang Mulia.

867. KETUA: SALDI ISRA [01:57:55]

Sedang di mana prosesnya?

868. TERMOHON: RIDUAN MARPAUNG [01:57:57]

Kami dari KPU pada sesuai dengan PKPU Nomor 008 Tahun 2024, bahwasannya syarat untuk mencalonkan diri adalah membuat surat pengunduran diri dan surat pengunduran diri tersebut telah diterima dan ditandatangani oleh instansi terkait tempat calon bekerja.

869. KETUA: SALDI ISRA [01:57:19]

Oke, cukup.
Bawaslu Toba. Coba jelaskan itu, soal Robinson.

870. BAWASLU: DANIEL SHARON DANIEL SHARON [01:58:32]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sepengawas (...)

871. KETUA: SALDI ISRA [01:58:37]

Ada gak laporan ke Bawaslu soal ini?

872. BAWASLU: DANIEL SHARON [01:58:38]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Laporan terkait tentang saudara Robinson Sitorus ada, Yang Mulia (...)

873. KETUA: SALDI ISRA [01:58:39]

Ya.

874. BAWASLU: DANIEL SHARON [01:58:42]

Tetapi setelah rekapitulasi di tingkat kabupaten, Pimpinan.

875. KETUA: SALDI ISRA [01:58:44]

Oke.

876. BAWASLU: DANIEL SHARON [01:58:46]

Setelah selesai rekapitulasinya.

877. KETUA: SALDI ISRA [01:58:44]

Laporannya setelah selesai, ya.
Oke, apa jawaban apa ... Bawaslu?

878. BAWASLU: DANIEL SHARON [01:59:02]

Tidak memenuhi syarat formil, Pimpinan.

879. KETUA: SALDI ISRA [01:59:02]

Kenapa tidak memenuhi syarat formil?

880. BAWASLU: DANIEL SHARON [01:59:04]

Waktu yang ditentukan sudah lewat 7 hari, Pimpinan.

881. KETUA: SALDI ISRA [01:59:09]

Waktu sejak penetapan pasangan calon, ya.

882. BAWASLU: DANIEL SHARON [01:59:10]

Ya.

883. KETUA: SALDI ISRA [01:59:11]

Oke, nanti dijelaskan, ya.

884. BAWASLU: DANIEL SHARON [01:59:13]

Siap, Pimpinan.

885. KETUA: SALDI ISRA [01:59:15]

Oke, nanti kita Pak Robinson ini kalau enggak berbahaya nih kan saudara Charles Robinson ini, Pak Robinson Sitorus ini.

Cukup, ya? Eh jangan dulu pak, Bapak ini gak sabar, masih ada yang lain Pak, sabar dulu.

Yang Mulia Pak Arsul ada yang mau disampaikan? Cukup? Pak Ridwan?

Nanti ada giliran Bapak, Pak. Ini masih ada hak konstitusional mereka yang di situ dulu kita kasih.

Terakhir, Kabupaten Merangin.

886. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [01:59:47]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum Wr. Wb.

887. KETUA: SALDI ISRA [01:59:52]

Ya. Silakan.

888. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [01:59:52]

Perbaikan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 tertanggal 5 Desember Tahun 2024.

889. KETUA: SALDI ISRA [02:00:08]

Ya.

890. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:00:08]

Dengan hormat, bersama ini, Nalim dan Nilwan Yahya dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 75 dan seterusnya, saya sendiri, Yuskandar, Erick Abdullah, S.Ag., dan rekan saya, Dimas Amanda di sebelah kiri saya, Yang Mulia. Kemudian seterusnya dianggap dibacakan.

Permohonan ini ... sebelum kami menyampaikan Petitem Permohonan ini, perkenankanlah Permohonan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap dibacakan karena sesuai dengan Ketentuan PMK 03.

891. KETUA: SALDI ISRA [02:00:50]

Ya.

892. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:00:51]

Yang ketiga. Kedudukan hukum. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar 3.798. Jadi, melebihi ambang batas, Yang Mulia.

893. KETUA: SALDI ISRA [02:01:08]

Ya.

894. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:01:09]

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 2 di atas dikarenakan ada antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran tertuktur, sistematis, dan masif berupa dan terindikasi diperoleh dari praktik pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara meluas yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah dan (...)

895. KETUA: SALDI ISRA [02:01:30]

Ini yang menang incumbent atau gimana?

896. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:01:33]

Tidak ada incumbent, Yang Mulia, sama-sama.

897. KETUA: SALDI ISRA [02:01:34]

Ini baru semua, ya?

898. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:01:36]

Sama-sama mulai baru, Yang Mulia.

899. KETUA: SALDI ISRA [02:01:37]

Ada hubungan Saudara dengan bupati incumbent? Enggak juga?

900. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:01:41]

Tidak ada, Yang Mulia.

901. KETUA: SALDI ISRA [02:01:42]

Oke, lanjut.

902. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:01:48]

Terus, Mulia. Bahwa berdasarkan ... beberapa yurisprudensi, maka kami mohon kepada Mahkamah untuk menunda pemberlakuan Pasal 158.

903. KETUA: SALDI ISRA [02:02:01]

Oke.

904. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:02:01]

Terhadap permohonan a quo.

905. KETUA: SALDI ISRA [02:02:02]

Ya, apa TSM-nya, Pak? Silakan, apa yang terjadi.

906. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:02:04]

Lanjut, Pokok Permohonan. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya praktik kecurangan dan seterusnya, kami anggap dibacakan.

Kemudian pelanggaran-pelanggaran sebelum dan saat pencobolosan, Termohon memanipulasi daftar hadir oleh petugas KPPS. Kemudian Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para pemilih.

907. KETUA: SALDI ISRA [02:02:31]

Ya.

908. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:02:32]

Terus, Termohon sengaja tidak secara benar menyosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP.

909. KETUA: SALDI ISRA [02:02:38]

Ya.

910. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:02:38]

Kemudian, pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS tidak sesuai dengan ketentuan penundangan yang berlaku.

Kemudian, adanya pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh Termohon beserta jajaran petugas Pemohon [!sic] pemilukada yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

911. KETUA: SALDI ISRA [02:02:50]

Ini pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, bagaimana bentuknya, Pak? Coba, Pak, Bapak uraikan. Kalimatnya, kan umum sekali. "Pemasangan DPT (Daftar Pemilih Tetap) oleh Termohon di banyak TPS tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu.” Bagaimana bentuknya itu yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan itu?

912. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:03:16]

Tidak dipasang pada papan yang sesuai dengan Peraturan KPU, Yang Mulia.

913. KETUA: SALDI ISRA [02:03:19]

Oke, tidak dipasang pada papan, ya?

914. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:03:21]

Ya.

915. KETUA: SALDI ISRA [02:03:21]

Tapi kalau tidak ada papan, kan boleh pada dinding, Pak?

916. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:03:25]

Ya, Maksudnya.

917. KETUA: SALDI ISRA [02:03:26]

Ya, kan?

918. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:03:26]

Ya, Yang Mulia.

919. KETUA: SALDI ISRA [02:03:27]

Tidak harus papan.

920. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:03:28]

Ya.

921. KETUA: SALDI ISRA [02:03:28]

Sekarang banyak juga di tempat yang tidak papan, dinding boleh.

922. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:03:29]

Siap, Yang Mulia.

923. KETUA: SALDI ISRA [02:03:30]

Ada dipasang pada dinding, enggak? Enggak juga?

924. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:03:33]

Ada juga, Yang Mulia.

925. KETUA: SALDI ISRA [02:03:34]

Oh, ada juga.

926. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:03:35]

Ya.

927. KETUA: SALDI ISRA [02:03:35]

Oke, lanjut.

928. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:03:36]

Kemudian, kita langsung ke poin 7, Yang Mulia. Adanya upaya penghalangan pengguna hak pilih oleh Termohon secara sistematis, terstruktur, masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

929. KETUA: SALDI ISRA [02:03:49]

Bagaimana caranya KPU menghalangi, Pak?

930. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:03:53]

Termohon (...)

931. KETUA: SALDI ISRA [02:03:53]

Orang mau datang, dilarang. "Eh, Bapak, enggak boleh datang." Begitu katanya?

932. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:03:56]

Buk ... tidak, Yang Mulia.

933. KETUA: SALDI ISRA [02:03:58]

Bagaimana caranya?

934. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:03:59]

Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih dan pendukung (...)

935. KETUA: SALDI ISRA [02:04:04]

Oke.

936. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:04:04]

Paslon 01 tidak dapat mendapat undangan di Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai. Kemudian di Desa Pulau Tengah (...)

937. KETUA: SALDI ISRA [02:04:14]

Oke.

938. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:04:15]

Muara Madras, Kecamatan Jangkat.
Nah, poin c. c. Bahwa di Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, di TPS hadir ditandatangani oleh cuma 1 orang, Yang Mulia.

939. KETUA: SALDI ISRA [02:04:23]

Oke.

940. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:04:25]

Ini, poin (...)

941. KETUA: SALDI ISRA [02:04:26]

Jadi, jadi begitu apanya ... kepentingannya KPU itu dia bisa menginventarisir ya, ini pendukung pasangan calon ini, ini begitu. Sampai begitunya, Pak, ya?

942. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:04:37]

Karena wilayahnya di desa-desa, Yang Mulia.

943. KETUA: SALDI ISRA [02:04:39]

Ya.

944. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:04:40]

Jadi, ketahuan kalau ini paslon... tim sukses, tim sukses.

945. KETUA: SALDI ISRA [02:04:43]

Sehingga tidak dikasih surat undangan, gitu ya.

946. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR: [02:04:45]

Ya.

947. KETUA: SALDI ISRA [02:04:46]

Oke. Nanti di jawab itu KPU apa ... Merangin mana? KPU Merangin? Nah, itu. Anda simak dengan baik, ya? Silakan.

948. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:04:56]

Kemudian (...)

949. KETUA: SALDI ISRA [02:04:56]

Apa lagi, Pak?

950. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:04:57]

Kemudian di poin d dan c ini *tergugat*, maksudnya Termohon, Yang Mulia. Mohon maaf.

951. KETUA: SALDI ISRA [02:05:00]

Ya.

952. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:05:01]

Itu direnvoi.

953. KETUA: SALDI ISRA [02:05:02]

Ya, Bapak kayak di pengadilan negeri saja ini. Terus? Lanjut, Pak!

954. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:05:10]

Ya. Terus, Yang Mulia. Kemudian (...)

955. KETUA: SALDI ISRA [02:05:13]

Apa lagi?

956. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:05:13]

Bahwa terhadap proses pencermatan tersebut, saksi Pemohon juga mengajukan keberatan yang dituangkan dalam formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pemilihan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten dalam Pemilukada 2024 di Kabupaten Merangin.

957. KETUA: SALDI ISRA [02:05:29]

Di TPS berapa yang keberatan saksi pasangan calon, Bapak?

958. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR

Ada di 17 kecamatan, Yang Mulia.

959. KETUA: SALDI ISRA

Bukan. Pertanyaan saya, itu berapa TPS yang Saksi Paslon Bapak yang keberatan? TPS berapa, Pak, di Merangin? Berapa jumlah TPS, Pak? Lupa?

960. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:05:50]

Ada 53 TPS, Yang Mulia.

961. KETUA: SALDI ISRA [02:05:52]

Mana KPU? Berapa jumlah TPS di Merangin? 634.

Pertanyaan saya ke Bapak, dari 634 TPS ini berapa TPS yang Saksi Paslon Bapak yang keberatan?

962. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR

Mohon maaf, Yang Mulia. Kita hanya kecamatan, Yang Mulia. Karena di tingkat PPK kecamatan keberatannya, bukan di TPS, Yang Mulia.

963. KETUA: SALDI ISRA [02:06:13]

Oh, di TPS enggak ada keberatan, ya?

964. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:06:15]

Tidak ada.

965. KETUA: SALDI ISRA [02:06:16]

Oke, oke.

966. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:06:16]

Temuannya di kecamatan, Yang Mulia.

967. KETUA: SALDI ISRA [02:06:17]

Oke. Biasanya kalau sudah keberatan di kecamatan karena hasilnya sudah tahu, Pak, cari-cari keberatannya, gitu.

Silakan lanjut, Pak. Biar nanti dijelaskan oleh KPU itu, kenapa ada masalah sampai kecamatan? Lanjut.

968. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:06:30]

Kemudian kami langsung ke poin b, Yang Mulia. Karena a dan b hampir sama.

969. KETUA: SALDI ISRA [02:06:34]

Ya.

970. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:06:35]

Bahwa Saksi Pemohon mengajukan keberatan dituangkan oleh Formulir D.Kejadian Khusus, adanya kotak suara untuk pemilihan Bupati di TPS 2 Desa Tiga Alur yang tidak disegel.

971. KETUA: SALDI ISRA [02:06:44]

Tidak disegel.

972. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:06:46]

Pada saat pengambilan kotak suara dari kecamatan ke Kabupaten Merangin.

973. KETUA: SALDI ISRA [02:06:50]

Oke, tidak disegel. Beda enggak ... apa ... jadinya suaranya? Suara di kecamatan setelah dihitung di kabupaten, beda enggak?

974. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:06:58]

Tidak, Yang Mulia.

975. KETUA: SALDI ISRA [02:07:00]

Kalau tidak beda ya bolehlah dimajukan catatan.

976. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:07:03]

Ya.

977. KETUA: SALDI ISRA [02:07:00]

Tapi kan hasilnya tidak beda. Terus?

978. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:07:06]

Siap, Yang Mulia.
Kemudian c dan d hampir sama.

979. KETUA: SALDI ISRA [02:07:09]

Ya.

980. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:07:10]

Jadi, kami bacakan yang c.
Bahwa di TPS 6 Dusun Bangko terjadi manipulasi absen ditandatangani oleh 1 orang.

981. KETUA: SALDI ISRA [02:07:17]

Oke.

982. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:07:17]

2. Ada TPS yang dipindahkan sebelum rekapitulasi selesai.

983. KETUA: SALDI ISRA [02:07:22]

Ini satu orang tandatangan apa?

984. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:07:23]

Ya. Sama semua, Yang Mulia.

985. KETUA: SALDI ISRA [02:07:24]

Sama tandatangannya?

986. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:07:25]

Ya.

987. KETUA: SALDI ISRA [02:07:26]

Saksi Bapak keberatan atau tidak di situ?

988. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:07:28]

Keberatan. Ini di form D ini, Yang Mulia.

989. KETUA: SALDI ISRA [02:07:31]

Iya, Formulir D itu kan kecamatan Pak, ya?

990. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:07:33]

Iya.

991. KETUA: SALDI ISRA [02:07:34]

Di kecamatan baru keberatan, tapi di TPS enggak keberatan?

992. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:07:37]

Karena ketahuan cuma di pleno kecamatan, Yang Mulia.

993. KETUA: SALDI ISRA [02:07:40]

Oke. Lanjut.

994. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:07:44]

Kemudian poin f.

Pada Kecamatan Jangkat dengan catatan TPS 3 Muara Madras absensi ditandatangani sendiri oleh penyelenggara pemilu.

2. Adanya pemilihan yang tidak berada di tempat, sedang terbaring di rumah sakit di luar Provinsi Jambi, tetapi absen ditandatangani oleh petugas KPPS.

995. KETUA: SALDI ISRA [02:08:06]

Oke.

996. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:08:07]

3. Ada beberapa pemilih yang berstatus sebagai mahasiswa kuliah di luar provinsi, bahkan di luar Pulau Sumatera, tapi dalam daftar hadir ditandatangani dan terdaftar memilih.

997. KETUA: SALDI ISRA [02:08:18]

Oke. Namanya enggak Bapak cantumkan?

998. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:08:20]

Di Alat Bukti kita cantumkan, Yang Mulia.

999. KETUA: SALDI ISRA [02:08:20]

Oke.

1000. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:08:22]

Termasuk absen yang dimanipulasi kita lampirkan di alat bukti.

1001. KETUA: SALDI ISRA [02:08:24]

Oke.

1002. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:08:25]

Nah, kemudian di poin G, proses perhitungan suara pada kecamatan ini *Tantan* di Alat Bukti kita, Yang Mulia, bukan Jangkat.

1003. KETUA: SALDI ISRA [02:08:41]

Ya.

1004. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:08:42]

Tidak ada kepastian hukum terhadap undangan yang tidak bertandatangan di tingkat KPPS.

1005. KETUA: SALDI ISRA [02:08:46]

Oke.

1006. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:08:47]

Sehingga tidak dapat dipastikan bahwa undangan tersebut benar-benar sampai ke pemilih. Ini di TPS 1, 3, dan 5, Sungai Ulas.

1007. KETUA: SALDI ISRA [02:08:57]

Oke.

1008. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:08:58]

Kemudian berikutnya, kami anggap dibacakan, kemudian langsung ke poin.

1009. KETUA: SALDI ISRA [02:09:07]

Poin berapa, Pak?

1010. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:09:08]

Po ... poin I.

1011. KETUA: SALDI ISRA [02:09:09]

Ya.

1012. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:09:11]

Bahwa terjadi penyalahgunaan hak pilih di TPS 02, Rantau Suli, adanya pemilih yang tidak memiliki e-KTP mencoblos.

1013. KETUA: SALDI ISRA [02:09:17]

Oke.

1014. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:09:18]

KPU menolak data pemilih yang belum memiliki e-KTP untuk disandingkan dengan absen sehingga hasil rekap tidak memiliki kepastian hukum.

1015. KETUA: SALDI ISRA [02:09:27]

Oke.

1016. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:09:28]

Kemudian M sampai dengan W kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

1017. KETUA: SALDI ISRA [02:09:33]

Oke. Apa lagi yang mau disampaikan, Pak?

1018. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:09:42]

Ini yang lain, kami anggap dibacakan. Kemudian (...)

1019. KETUA: SALDI ISRA [02:09:44]

Ya. Ini ucapan-ucapan selamat ini apa ini, Pak?

1020. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:09:51]

Ini ketidaknetralnya beberapa ASN. Jadi, setelah Pleno KPU, langsung banyak karangan bunga, Yang Mulia (...)

1021. KETUA: SALDI ISRA [02:10:01]

Langsung (...)

1022. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:10:01]

Ya.

1023. KETUA: SALDI ISRA [02:10:02]

Banyak karangan bunga, ya?

1024. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:10:05]

Padahal belum ditetapkan sebagai calon terpilih.

1025. KETUA: SALDI ISRA [02:10:10]

Ya. Nih, mungkin pengetahuannya kurang ini, Pak, belum ada calon terpilih ketika itu, peraih suara terbanyak baru.

1026. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:10:14]

Ya, tapi ini kepala dinas, Yang Mulia.

1027. KETUA: SALDI ISRA [02:10:10]

Ya, Pak. Jadi, ini untuk membuktikan bahwa ada ketidaknetralan, ya?

1028. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:10:19]

Ya, Yang Mulia.

1029. KETUA: SALDI ISRA [02:10:22]

Oke. Apa lagi?

1030. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:10:23]

Kemudian, ada juga penyalahgunaan jabatan oleh Anggota DPR, reses menggunakan (...)

1031. KETUA: SALDI ISRA [02:10:31]

Anggota DPRD atau DPR, Pak?

1032. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:10:33]

DPRD. DPRD Kabupaten Merangin menggunakan fasilitas negara, tapi berkampanye mengkampanyekan paslon yang dicalonkan oleh partainya, Yang Mulia.

1033. KETUA: SALDI ISRA [02:10:42]

Bapak, cek enggak, orang itu masuk enggak di daftar apa ... tim kampanye? Pak Yuzan ini masuk enggak di tim kampanye namanya?

1034. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:10:50]

Masuk, Yang Mulia.

1035. KETUA: SALDI ISRA [02:10:53]

Kalau masuk boleh kampanye, Pak.

1036. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:10:54]

Tapi dia berkampanye pada saat reses, Yang Mulia. Yang kita permasalahan menggunakan fasilitas negaranya itu, Yang Mulia.

1037. KETUA: SALDI ISRA [02:11:01]

Apa fasilitasnya, Pak?

1038. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:11:05]

Ya, mobil, dia ada SPPD, ada SK.

1039. KETUA: SALDI ISRA [02:11:05]

Ada SK juga?

1040. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:11:07]

Ya, kita lampirkan di alat bukti, Yang Mulia.

1041. KETUA: SALDI ISRA [02:11:05]

Pak Yuzan ini, ya?

1042. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:11:10]

Ya, Pak Yuzan, Yang Mulia.

1043. KETUA: SALDI ISRA [02:11:11]

Tapi ketika itu reses, ya?

1044. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:11:13]

Ya, ada rekamannya.

1045. KETUA: SALDI ISRA [02:11:14]

Oke.

1046. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:11:16]

Ada saksi yang menyaksikan resesnya, Yang Mulia.

1047. KETUA: SALDI ISRA [02:11:14]

Ya. Terus, Pak?

1048. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:11:22]

Kemudian, untuk petitum.

1049. KETUA: SALDI ISRA [02:11:23]

Petitum, lanjut.

1050. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:11:24]

Kami serahkan dengan rekan saya (...)

1051. KETUA: SALDI ISRA [02:11:26]

Silakan.

1052. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:11:27]

Untuk melanjutkan, silakan.

1053. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: DIMAS AMANDA WAHID [02:11:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk melanjutkan membacakan Petitum.

1054. KETUA: SALDI ISRA [02:11:33]

Ya.

1055. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: DIMAS AMANDA WAHID [02:11:34]

Berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 ditetapkan Termohon

pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 17.20 WIB adalah batal, tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atau setidaknya.
4. Melakukan pemungutan suara ulang di setiap desa dan TPS pada 10 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pangkalan Jambu, Kecamatan Tabir Lintas, Kecamatan Jangkat, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pemenang, Kecamatan Lembah Masurai, Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Jangkat Timur, Kecamatan Muara Siau, Kecamatan Nalo Tantan pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan.
5. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki daftar pemilih tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih, Yang Mulia.

1056. KETUA: SALDI ISRA [02:13:17]

Oke. Itu *atau setidaknya* itu alternatif atau kumulatif?

1057. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [02:13:40]

Alternatif, Yang Mulia.

1058. KETUA: SALDI ISRA [02:13:23]

Oke.

4, itu alternatif terhadap berapa?

1059. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [02:13:26]

Terhadap nomor 3.

1060. KETUA: SALDI ISRA [02:13:27]

Oke. 4 alternatif terhadap 3, ya?
Saya lingkari ini, betul Pak, ya?

1061. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [02:13:32]

Betul, Pak.

1062. KETUA: SALDI ISRA [02:13:33]

Oke. Cukup? Yang Mulia Pak Arsul, Pak Ridwan? Cukup, ya?
Jadi, ini sudah cukup, sudah selesai kita, Para Pemohon sudah menggunakan hak konstitusionalnya.

Oke, siapa yang mau angkat tangan? Bapak silakan, apa yang mau disampaikan, Pak? Dari mana ini? Pihak Terkait apa?

1063. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [02:14:01]

Terima kasih, Yang Mulia, dari Perkara Nomor 94, Kabupaten Toba. Pihak Terkait.

1064. KETUA: SALDI ISRA [02:14:04]

Oke.

1065. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [02:14:05]

Pihak Terkait. Kami tadi mendengar pada saat Pemohon membacakan permohonannya, kami bingung apakah permohonan, permohonan awal atau perbaikan.

1066. KETUA: SALDI ISRA [02:14:16]

Ya.

1067. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [02:14:17]

Karena apa yang dibacakan tidak sesuai dengan perbaikan atau permohonan awal.

1068. KETUA: SALDI ISRA [02:14:22]

Itu nanti Bapak jawab itu di keterangan Bapak sebagai Pihak Terkait. Kalau saya pandu Bapak nanti, Bapak memihak saya kepada Bapak nanti.

1069. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [02:14:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

1070. KETUA: SALDI ISRA [02:14:29]

Ya.

1071. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [02:14:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

1072. KETUA: SALDI ISRA [02:14:31]

Oke, ada yang lain? Silakan, ini Pihak Terkait dari berapa?

1073. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACE KURNIA [02:14:38]

Saya, Yang Mulia.

1074. KETUA: SALDI ISRA [02:14:39]

Silakan.

1075. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACE KURNIA [02:14:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya dari Pihak Terkait Perkara 291, 298, 296.

1076. KETUA: SALDI ISRA [02:14:45]

Oh, ini 3 ini, ya?

1077. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACE KURNIA [02:14:47]

Bersama Prinsipal langsung, Bapak Nawipa.

1078. KETUA: SALDI ISRA [02:14:48]

Ya.

1079. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACE KURNIA [02:14:50]

Mohon izin, Yang Mulia, sebagaimana tadi, Yang Mulia, sampaikan bahwa setelah dipersidangan kami diberikan hak untuk mengajukan beberapa hal.

Yang pertama, saya ingin mengajukan permohonan untuk memeriksa atau mempelajari berkas atau inzage, Yang Mulia.

1080. KETUA: SALDI ISRA [02:15:04]

Oke, apa lagi?

1081. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACE KURNIA [02:15:05]

Ini sudah kami siapkan dan mohon diizinkan untuk langsung diserahkan dalam persidangan.

1082. KETUA: SALDI ISRA [02:15:09]

Apa lagi? Itu saja?

1083. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACE KURNIA [02:15:11]

Cukup, Yang Mulia.

1084. KETUA: SALDI ISRA [02:15:13]

Oke.
Bapak, silakan!

1085. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERMANSYAH DULAIMI [02:15:15]

Sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, Yang Mulia, bahwa saya adalah Kuasa tambahan dalam Perkara 38 dari Pihak Terkait.

1086. KETUA: SALDI ISRA [02:15:22]

Oke, silakan ambil surat kuasanya! Petugas, itu! Ini kalau tidak diterima nanti enggak ada tekengan Beliau. Kasihan kita ini.

Oke, nanti kita tambahkan. Sebelumnya berapa orang Kuasanya, Pak?

**1087. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
138/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERMANSYAH DULAIMI
[02:15:54]**

6.

1088. KETUA: SALDI ISRA [02:15:56]

6, sekarang jadi 7?

**1089. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
138/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERMANSYAH DULAIMI
[02:15:57]**

Tambah 2.

1090. KETUA: SALDI ISRA [02:15:58]

Oh, tambah 2. Saya kira 1 tambahnya. 2.
Oke, nanti kita cek.

**1091. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
38/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERMANSYAH DULAIMI [02:16:03]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum.

1092. KETUA: SALDI ISRA [02:16:03]

Terima kasih, ada lagi yang lain? Ini, oke.
Termohon perkara berapa?

**1093. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FIKRI SURYA [02:16:07]**

Perkara Nomor 38, Yang Mulia.

1094. KETUA: SALDI ISRA [02:16:09]

38.

1095. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIKRI SURYA [02:16:07]

Ya. Izin, saya ingin melampirkan Surat Kuasa beserta izin juga ingin melakukan inzage, Yang Mulia.

1096. KETUA: SALDI ISRA [02:16:15]

Ya, nanti kita umumkan itu. Surat Kuasa aja diserahkan, ya.

1097. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 38/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIKRI SURYA [02:16:18]

Siap, terima kasih, Majelis.

1098. KETUA: SALDI ISRA [02:16:18]

Ada yang lain? KPU?

1099. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENRY SIMON SITINJAK [02:16:00]

Baik, Kuasa dari Perkara 964 [*sic!*], Yang Mulia. Mau mendaftarkan apa ... Surat Kuasa.

1100. KETUA: SALDI ISRA [02:16:28]

Ya.

1101. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENRY SIMON SITINJAK [02:16:29]

Baru dilaporkan (...)

1102. KETUA: SALDI ISRA [02:16:30]

Nanti diserahkan ke Kepaniteraan, ya.

1103. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENRY SIMON SITINJAK [02:16:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

1104. KETUA: SALDI ISRA [02:16:30]

Oke, ada lagi yang lain? Cukup?

Nah, ini pengumuman untuk semua.

1. Tolong semuanya melengkapi bukti, mau menyerahkan atau mau melengkapi, silakan. Optimalkan pembuktian di tahap ini. Soal, belum tentu permohonan Bapak-Bapak ini akan lanjut. Oleh karena itu, dioptimalkan bukti di tahap ini. Kalau nanti kami merasa perlu dilanjutkan, akan dilanjutkan. Oke? Termasuk Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Satu.

Yang kedua. Kalau mau inzage dipersilakan mulai dari pukul 08.00 Pagi sampai pukul 16.00 Sore di Gedung 1 dengan cara membuat Permohonan, oke? Jadi, inzage ada ruangnya khusus di Gedung 1.

Ada yang lain? Cukup? Sebelum kita sahkan bukti-bukti.

Kita mulai dari Perkara 38. Perkara 38 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-3. Betul? Perkara 38 siapa, Pemohon? Oh, yang tadi, ya, yang tadi pulang. Enggak ada wakilnya, pulang dua-duanya? Aduh. Okelah, yang penting ini ... apa ... disahkan. Sudah diverifikasi. Jadi, P-1 sampai P-3. Bukti tambahan P-4 sampai dengan P-31.

KETUK PALU 1X

89. P-1 ... menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-10. 89, betul? Betul, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, nanti kalau ada tambahan ditambahkan, tapi belum bisa diverifikasi hari ini, ya. Tapi, KTA atas nama Eko Saputra, Andre Prayogi, dan Giri Suseno sudah expired. Sudah lewat waktu. Oke, perpanjangannya diserahkan, ya? Ya.

291. Paniai menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-68. Oke, tapi ada catatan, P-56 sampai dengan P-68, bukti dalam bentuk flashdisk tidak dileges, tolong dileges, ya! Kemudian P-47, bukti fisik berbeda dengan DAB, tolong disesuaikan! Ya, ini dileges per satu nomor bukti. Jadi, kalau bukti P sekian satu legesnya, ini kesempatan juga ini orang-orang berperkara membantu negara dalam bentuk apa ... bayar pajak, materai. Yang tidak masalah disahkan.

KETUK PALU 1X

Paniai 296, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-39. Betul, ya? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Tapi KTA Periat, Sergius, Walidi, Tondi, dan Ritisman ... Rintisman sudah expired. Sidang berikutnya yang expired-expired, tidak kita perkenankan masuk ruangan kalau tidak diperbaharui. Setidak-tidaknya keterangan sudah melakukan pembaharuan.

Oke, 298 Paniai. P-1 sampai dengan P-54. Tapi ada catatan, P-27 berupa foto, tapi tidak jelas angka tabulasi suaranya. Tolong disampaikan yang jelas, ya. Di luar itu disahkan.

KETUK PALU 1X

KTA Iqbal Tawakkal dan Ainul Yaqin expired. Kemudian KTP Wakil Kamal. Nah, ini KTP ini akan expired bulan Februari ... KTA maaf, KTP.

59. Labuhanbatu menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-1.062. Ya, betul? Nah, ini catatannya. Bukti fisik tidak ada sebagaimana dalam bep ... dalam Daftar Alat Bukti, yaitu p-sat ... P-9, P-9.1 sampai dengan P-9.3, P-152 sampai dengan P-153, P-168, P-181, P-218 sampai dengan P-219, P-221, P-223 sampai P-224, P-227, P-232 sampai P-233, P-242 sampai P-244, P-247 sampai dengan P-260, P-264, P-273 sampai P-277, P-280 sampai dengan P-301, P-304 sampai dengan P-306, P-308 sampai dengan P-313.

Ya, nanti tolong diperbaiki, sepanjang yang tidak bermasalah disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini, tolong hardcopy-nya, softcopy dari permohonan diserahkan ya, softcopy-nya. Terdapat perbedaan antara softcopy dan hardcopy perbaikan permohonan. Yang digunakan yang hardcopy yang sudah diserahkan ke Mahkamah.

Kabupaten Toba, Surat Kuasa expired ... ini Surat Kuasa, maksudnya KTA, Hobbin Gultom, Rony Eli Hutaian ... Hutahaean, daftar Bukti P-1 sampai dengan P-28, Toba.

1105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: HOBBIN GULTOM [02:22:51]

Betul, Yang Mulia.

1106. KETUA: SALDI ISRA [02:23:05]

Betul, ya, Bukti P-3 tidak terbaca dengan jelas, nanti tolong dikomunikasikan dengan bagian Kepaniteraan.

1107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: HOBBIN GULTOM [02:23:05]

Baik, Yang Mulia.

1108. KETUA: SALDI ISRA [02:23:10]

Disahkan sepanjang yang tidak bermasalah.

KETUK PALU 1X

Kabupaten Merangin menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, betul? Ini ada catatan, bukti fisik yang tidak ada, P-6E, P-6F, dan P-7. Siapkan, ya. Bukti P-11A-14 ... Bukti P-11A-14 tidak sesuai dengan bukti fisik dengan daftar alat bukti, nanti diperbaiki. Bukti P-13C tidak sesuai antara bukti fisik dengan daftar alat bukti, nanti disesuaikan, Pak, ya, selain itu disahkan.

KETUK PALU 1X

1109. KETUA: SALDI ISRA [02:24:00]

Selesai agenda kita sore hari ini.

Jadi, hari ini sudah selesai giliran dari Pemohon. Sidang berikutnya nanti akan diberitahu, kita akan mendengarkan jawaban Termohon. Jadi, semua tuduhan tadi. Nah ini bahasa, bahasa, bahasa ... apanya ... gampang dia mengerti, semua tuduhan atau dalil tolong dijelaskan oleh Termohon, dibantah dan dibuktikan bahwa itu tidak benar. Begitu juga Pihak Terkait dan Bawaslu supaya nanti, jangan ... apa namanya ... institusi menjadi tidak bisa menjelaskan kalau Anda tidak bisa menjelaskan, KPU, berarti benar itu.

1110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [02:24:06]

Izin, Yang Mulia. Izin dari 296. Ini ada masukan saya, saya merasa keberatan menurut saya ketika Terkait, Termohon mempelajari Inzage, sementara kami nanti tidak ... sampai dengan pemeriksaan awal, kami tidak diberi kesempatan mempelajari Inzage.

1111. KETUA: SALDI ISRA [02:25:12]

Ya.

1112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025: SERGIUS WABISER [02:25:12]

Atau Inzage untuk mempelajari bukti. Mereka akan memberi jawaban mereka terhadap Permohonan kami dengan mereka sudah melihat punya kami, tapi kami tidak. Nah, ini hanya catatan saya saja.

Yang berikut, mohon untuk yang dilihat adalah kalau memang diizinkan, dari pertanyaan saya, kalau diizinkan yang ditetapkan saja, hari ini bukti yang ditetapkan bisa di inzage. Terima kasih. Artinya, itu saran saya. Terima kasih.

1113. KETUA: SALDI ISRA [02:25:46]

Ya, kalau soal inzage memang begitu, Pak. Jadi boleh orang melihat dan nanti akan mereka lihat itu yang sudah ditetapkan Mahkamah. Oke, ya. Kalau yang belum kan belum diverifikasi. Jadi, enggak bisa dianggap bukti yang sah. Ya, Pak, ya. Memang begitu hukum acaranya diperbolehkan. Nanti Bapak boleh juga inzage ke mereka, ya? Oke, cukup? Ada yang lain?

Nah, tadi saya di mana Bapak potong tadi itu? Jadi, tolong dijelaskan apa yang didalilkan oleh Pemohon diikuti dengan bukti-buktinya. Jawab per dalil itu supaya nanti kami bisa menilai apakah dalil itu benar atau tidak. Pihak Terkait begitu juga, Bawaslu terutama yang menyangkut Bawaslu, satu.

Yang kedua, kalau ada yang didalilkan Pemohon yang ada dalam ranah pengawasan Bawaslu, tolong dijelaskan supaya kami ada pembanding. Karena orang ini Pihak Terkait dengan Termohon itu akan ... ya mirip-miriplah, 11-12 jawabannya. Nah, ini yang akan jadi pihak penengah. Nanti kami akan periksa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan ke Mahkamah.

Cukup, ya? Cukup semua. Terima kasih atas ketertibannya dalam mengikuti persidangan ini. Dan dengan demikian, sidang dengan Agenda Pendahuluan, Mendengarkan Keterangan atau Mendengarkan permohonan Pemohon untuk Perkara 38, 89, 291, 296, 298, 59, 94, 180, PHPU, Bupati dan Wali Kota dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.24 WIB

Jakarta, 13 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

